

**PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TERHADAP  
MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
MAHASISWA MEMBAYAR DANA PENDIDIKAN  
DI STIKES KARSA HUSADA KABUPATEN GARUT**

Laporan Penelitian Dosen STIKes Karsa Husada Garut



Disusun Oleh:

Ketua: Andhika Lungguh Perceka, S. Kom., M. Si

Anggota: 1. Novie Melliasany, SE., M. Si

2. Herlin Rusyani, SH., M. Pd

**STIKES KARSA HUSADA GARUT**

**2021**

## ABSTRAK

### **PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MAHASISWA MEMBAYAR DANA PENDIDIKAN DI STIKES KARSA HUSADA KABUPATEN GARUT**

*Andhika Lungguh Perceka/S1 Keperawatan/STIKes Karsa Husada Garut*

*Novie Melliasany/D3 Keperawatan/STIKes Karsa Husada Garut*

*Herlin Rusyani/D3 Keperawatan/STIKes Karsa Hsuada Garut*

Dana pendidikan yang bersumber dari partisipasi mahasiswa merupakan salah satu sumber dana pendidikan utama di perguruan tinggi swasta. Pemanfaatan dana pendidikan bagi kepentingan mahasiswa akan ditentukan oleh manajemen keuangan yang baik dan terencana. Oleh karena itu pemerintah maupun pengelola perguruan tinggi swasta senantiasa berupaya untuk memberikan arahan dan aturan yang jelas terkait dengan pengelolaan dana pendidikan, aturan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengungkap dan menganalisis pengaruh-pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap manajemen keuangan dalam upaya meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan di STIKes Karsa Husada Kabupaten Garut.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey deskriptif analisis. Populasi penelitian ini sebanyak 380 orang yang terdiri atas pengurus yayasan, staf pegawai bagian keuangan dan mahasiswa angkatan 2018-2020 STIKes Karsa Husada. Sementara itu sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 orang yang diambil atas dasar teknik *Stratified random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, studi lapangan dan angket. Sementara itu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Swasta, manajemen keuangan maupun partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan menunjukkan kriteria baik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen keuangan; kebijakan pengelolaan keuangan juga memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan; manajemen keuangan memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan; dan secara umum pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen keuangan dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan. Beberapa temuan permasalahan penting yang berkaitan dengan variabel pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan keuangan adalah berkaitan dengan kejelasan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Pada variabel manajemen keuangan berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran, dan pada variabel partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan terjadi pada masih rendahnya mahasiswa membayar dana pendidikan secara tepat waktu.

## **ABSTRACT**

### **INFLUENCE THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL MANAGEMENT POLICIES OF PRIVATE UNIVERSITIES TO IMPROVE FINANCIAL MANAGEMENT IN EDUCATION FUNDING TO PAY STUDENTS' PARTICIPATION IN STIKES KARSA HUSADA GARUT REGENCY**

*Andhika Lungguh Perceka/S1 Keperawatan/STIKes Karsa Husada Garut  
Novie Melliasany/D3 Keperawatan/STIKes Karsa Husada Garut  
Herlin Rusyani/D3 Keperawatan/STIKes Karsa Hsuada Garut*

*Education funds derived from student participation is one of the main sources of funding education in private universities. Utilization of education funds for the benefit of students will be determined by sound financial management and planning. Therefore the government or private college managers constantly strive to provide guidance and clear rules relating to the management of education funds, the rules embodied in the form of financial management policies. This study aims to explore, uncover and analyze the effect of the influence of the implementation of financial management policies of private colleges to financial management in an effort to increase the participation of students in education funds paid in STIKes Karsa Husada Garut Regency.*

*The method used in this study is a survey method descriptive analysis. The study population comprised 380 people, on board of trustees, staff employees of finance department and students batch from 2018 to 2020 in STIKes Karsa Husada. While the samples in this study were 80 people who were taken on the basis of stratified random sampling technique. Data collection techniques used are documentation studies, field studies and questionnaires. While the technical analysis of the data used is the statistical analysis with path analysis method. The results showed that the implementation of the policy variables private university financial management, financial management and student participation in education funds paid to show both criteria. Hypothesis testing results show that the implementation of financial management policies have a positive influence on financial management; financial management policies have a positive influence on student participation in education funds paid; financial management has a positive influence on student participation in education funds paid, and the general implementation of financial management policies have a positive impact on improving financial management in education funds to pay student participation.*

*Some of the findings of key issues relating to financial management on variables related to financial management budget planning, and in the student participation variable occurs in the low level to pay education funding on time.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ( UU Sisdiknas, 2003 pasal 1 ayat 1).

Pendidikan dipandang sebagai alat vital dalam memajukan dan membuat suatu bangsa menjadi modern, mempunyai ketangguhan dalam menghadapi permasalahan kehidupannya. Dalam hal ini pendidikan pun dianggap merupakan faktor yang dapat menentukan kualitas hidup atau meningkatkan standar hidup suatu bangsa.

Satu hal yang penting terhadap pemikiran baru bahwa pendidikan dianggap sebagai salah satu bentuk investasi (*Human Investment*). Dimana konsep ini menyatakan bahwa orang yang memiliki keterampilan tertentu, kebiasaan dan pengetahuan dapat mereka jual dalam bentuk pekerjaan untuk memperoleh upah atau gaji, sehingga dapat diperankan sebagai sumber selama hidup mereka (Jones, dalam Fattah, 2004:12). Lebih jauh "*human capital*" ini dapat dianalogikan sebagai modal fisik karena kedua-duanya digunakan untuk menghasilkan pendapatan tetap bertahun-tahun lamanya. Pendidikan dapat dipandang sebagai konsumsi jika pendidikan *benefit*-nya dapat dinikmati langsung pada saat dikonsumsi, dan pendidikan sebagai investasi tentu *benefit*-nya dapat dirasakan setelah beberapa waktu kemudian.

Dalam menyelenggarakan pendidikan memerlukan biaya. Biaya dipergunakan untuk menyediakan gedung sekolah atau kampus dan fasilitas lainnya, untuk membayar guru atau dosen, menyediakan kurikulum dan pelayanan lainnya. Salah satunya adalah perguruan tinggi merupakan salah satu jenjang pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan diantaranya untuk menghasilkan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen. Karena dalam penyelenggaraan pendidikannya tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya sehingga lembaga pendidikan harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya ini, sehingga biaya yang dimiliki berdasarkan penerimaan dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya.

Keuangan merupakan satu hal penting dalam keberlangsungan suatu organisasi. Berjalan tidaknya aktivitas organisasi akan ditentukan oleh keberadaan keuangan. Begitu pula dalam dunia pendidikan, keuangan memiliki arti penting terhadap kelancaran kegiatan dan proses pendidikan yang dilaksanakan. Sumber dana pendidikan bagi perguruan tinggi swasta secara umum bersumber dari dana bantuan pemerintah dan dana partisipasi mahasiswa dalam bentuk pembayaran uang kuliah, maupun keuangan lainnya yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Salah satu tantangan utama perguruan tinggi di Indonesia dewasa ini adalah bagaimana menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif terutama perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri pun sekarang diminta mencari sumber sendiri karena pemerintah secara perlahan mengurangi subsidi pendidikan. Perguruan tinggi umumnya masih mencari sumber pembiayaan dari kontribusi mahasiswa-mahasiswi. Pendanaan ternyata masih menjadi batu sandungan untuk perguruan tinggi swasta di Indonesia. Salah satunya, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTİK) yang harus merapatkan barisan agar anggotanya memiliki kualitas pendidikan yang sama meskipun pendanaannya tak sebaik anggotanya yang memiliki lebih banyak mahasiswa.

Pemerintah memang memberikan kewenangan penuh bagi Perguruan Tinggi (PT) mengelola manajemen secara otonom. Namun sayangnya PT belum mampu melakukan diversifikasi sumber pendanaan atau usaha yang lain untuk mendukung penyelenggaraan di PT. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sekretaris APTIK, Bernadette Setiadi yang mengaku 17 PT dari 19 PT yang tergabung di APTIK memiliki mahasiswa kurang dari 5.000 orang yang termasuk kategori sedang. Sementara pendanaan selama ini tergantung pada jumlah mahasiswa. Sehingga pencapaian kualitas pendidikan sangat tergantung sekali pada pemasukan dari mahasiswa. Bahkan sepertiganya, anggota kami memiliki kategori kecil dengan mahasiswa kurang dari 1.000 mahasiswa.

Permasalahan keuangan di beberapa perguruan tinggi, khususnya di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut, adalah belum optimalnya kesadaran mahasiswa dalam membayar keuangan pendidikan, baik uang kuliah maupun keuangan pendidikan lainnya. Berdasarkan hasil observasi awal di STIKES Karsa Husada, terungkap bahwa hampir 23,11% mahasiswa masih menunggak dalam pembayaran uang kuliah. Kondisi ini sering kali menjadi penghambat terhadap kelancaran proses perkuliahan. Relatif besarnya uang perkuliahan yang ditambah dengan uang praktek kesehatan seringkali menjadi faktor penghambat mahasiswa dalam membayar keuangan pendidikan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut.

Berdasarkan data yang diperoleh di bagian keuangan STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut, terungkap bahwa belum sepenuhnya mahasiswa menyadari dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan pembayaran uang kuliah. Berikut dikemukakan tingkat kesadaran mahasiswa dalam membayar uang kuliah.

**Tabel 1.1**  
**Rata-rata Tingkat Kesadaran Mahasiswa Membayar Uang Kuliah**

No	Prog. Studi	Jml Mhs	Pembayaran Uang Kuliah	
			Tepat Waktu	Nunggak
1.	S1 Keperawatan Reguler	262	209	53

2.	S1 Keperawatan Non Reguler	172	137	35
3.	D3 Keperawatan Reguler	364	281	83
4.	D3 Keperawatan Non Reguler	22	15	7
5.	D3 Kebidanan	370	275	95
6.	NERS	30	21	9
Jumlah		1220	938	282

Sumber: Bag. Keuangan STIKES Karsa Husada Th. 2018-2020

Menyikapi kondisi permasalahan tersebut tampaknya perlu dilakukan upaya mengelola keuangan di perguruan tinggi khususnya di STIKES Karsa Husada dalam bentuk mengoptimalkan manajemen keuangan yang didasarkan pada kebijakan dan aturan yang berlaku di perguruan tinggi.

Manajemen Keuangan merupakan suatu proses dalam merencanakan, mengelola, dan mengatur keuangan secara keseluruhan. Gitman (2006) mendefinisikan keuangan sebagai seni (*art*) dan ilmu (*science*) mengenai pengelolaan uang. Secara berbeda, Emery et al. (2004:2) menyatakan bahwa keuangan merupakan sebuah disiplin yang berhubungan dengan penentuan nilai dan pengambilan keputusan. Fungsi keuangan mengalokasikan sumber daya -sumber daya yang mencakup perolehan, penginvestasian, dan pengelolaan sumber daya tersebut. Senada dengan Emery, Rahardjo (2001:6) mengemukakan bahwa keuangan merupakan pengelolaan sumber daya uang yang dimiliki oleh badan usaha, pemerintah, atau individu-individu.

Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan putusan dan manajemen sumberdaya yang tepat (Emery et al., 2004:3). Rahardjo (2001:6) menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah akuisisi, manajemen, dan pembiayaan terhadap sumberdaya-sumberdaya bagi badan usaha dengan menggunakan uang dan berhubungan dengan harga-harga di pasar ekonomi eksternal.

Realisasi manajemen keungana tidak akan terlepas dari aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan dimaksud adalah kebijakan yang berlaku di perguruan tinggi terkait

dengan pengelolaan keuangan. Meskipun secara umum perguruan tinggi swasta memiliki otonom dalam pengelolaan keuangan, namun dalam beberapa hal tetap saja harus mengacu pada kebijakan yang berlaku di perguruan tinggi. Oleh karena itu perlu ada implementasi yang baik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan sehingga mampu memberikan arah pada manajemen keuangan sehingga dapat meningkatkan efektivitas laporan serta mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam membayar dana pendidikan.

Terkait dengan uraian di atas, muncul ketertarikan untuk melaksanakan pengkajian dan penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan manajemen keuangan sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas laporan serta meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam membayar dana pendidikan. Ketertarikan tersebut dituangkan dalam judul penelitian: **"Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta terhadap Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa Membayar Dana Pendidikan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut"**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak dari uraian di atas, pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut: "Partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan belum optimal, diduga antara lain karena manajemen keuangan belum berjalan dengan baik yang didasarkan pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, maka pertanyaan utama penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: "Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap manajemen keuangan dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut?".



Dari masalah utama tersebut fokus penelitian dilakukan berdasarkan pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh pelaksanaan Kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap manajemen keuangan?
2. Adakah pengaruh pelaksanaan Kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan?
3. Adakah pengaruh manajemen keuangan terhadap partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini untuk mengkaji fenomena keuangan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta, manajemen keuangan, dan partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap manajemen keuangan dalam upaya meningkatkan partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan pelaksanaan penelitian ini akan dapat memberikan minimal 2 kegunaan antara lain:

#### **1. Aspek Pengembangan Ilmu**

Secara keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan sebagai realisasi dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang merupakan salah satu kebijakan publik yang berlaku di perguruan tinggi swasta.

## **2. Aspek Guna Laksana**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut dalam merealisasikan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta sebagai landasan dalam meningkatkan manajemen keuangan, sehingga mampu meningkatkan meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam membayar dana pendidikan.

### **1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

#### **1.5.1 Kerangka Pemikiran**

Kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta yang didasarkan pada Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 yang telah disempurnakan melalui Keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004, khususnya Bab VIII pasal 57 tentang Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, mengamanatkan bahwa kepala satuan wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya serta membuat laporan pertanggungjawaban kepada instansi vertikal di atasnya.

Di samping itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-332/M/V/9/1968 tanggal 28 September 1968 yang merupakan salah satu dasar bagi pengelola keuangan negara menyatakan bahwa setiap bendaharawan atau pemegang buku kas yang mengurus uang negara harus mempunyai Buku Kas Umum (BKU) dan mencatat semua

pengeluaran dan penerimaan. Catatan ini dilakukan sebelum pembukuan dalam buku-buku kepala dan register-register.

Fenomena masalah tersebut berkaitan dengan pemerintahan negara yaitu mengenai administrasi negara. White (dalam Iskandar, 2004 : 53) menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara (*public administration consists of all those operations having for their purpose the fulfillment and enforcement of public policy*).

Perkembangan lebih lanjut seiring dengan terjadinya fenomena baru berupa perubahan-perubahan birokrasi ke arah paradigma baru, memandang bahwa organisasi pemerintahan tidak hanya melakukan pemenuhan akan barang publik tetapi juga melakukan motivator bagi bertumbuh kembangnya peran serta masyarakat. Pengaruh perubahan tersebut ditandai oleh pergeseran nilai (*shfit of value*), keterhubungan (*interconnected*) dan ketidakpastian (*unprediction*) dalam berbagai kehidupan, untuk itu diperlukan kearifan dalam menentukan strategi dan kebijakan. Dalam hal ini peranan administrasi sangat penting, karena kaitannya sangat erat dengan perumusan berbagai kebijakan negara serta implementasinya.

Administrasi publik (*public administration*) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut adminitrasi publik, adalah salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu, sudah dikenal sejak keberadaannya sistem politik di suatu negara. (Iskandar, 2004:48)

Oleh karena itu, administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula terhadap tingkat implementasi kebijakan, karena memang

administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan politik.

Dari pernyataan di atas, administrasi publik tercermin dari efisien dan efektivitas individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan resmi sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik.

Sehubungan dengan uraian di atas, adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah terkait dengan kebijakan publik. Dimensi pertama yang menjadi pokok perhatian administrasi negara ialah kebijakan publik. Bidang kajian ini amat penting bagi administrasi negara, karena selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, dapat juga digunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas sehingga merupakan ilmu pengetahuan yang dapat dikaji oleh ilmu-ilmu lain. Pada kenyataannya pembuat kebijakan publik cenderung kesulitan memutuskan suatu kebijakan publik, karena luasnya cakupan tersebut. Kebijakan publik disatu pihak berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, dan dipihak lain kebijakan merupakan suatu teknik atau cara mengatasi berbagai masalah yang dialami masyarakat.

Secara teoretis, rumusan kebijakan publik antara lain ditafsirkan Dye dan Peters dalam Iskandar (2005:169) adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijaksanaan itu merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah, apa yang

menyebabkan atau yang mempengaruhinya, dan apa pengaruh dan dampak kebijaksanaan publik tersebut.

Sejalan dengan pandangan tersebut Eulau dan Prewitt (dalam Jones, 1996 : 47) mengemukakan bahwa kebijakan adalah : “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*revelitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya Jones menjelaskan bahwa definisi tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud serta siapa sebenarnya menentukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan tersebut.

Hal terpenting dari suatu kebijakan publik adalah pelaksanaan atau implementasinya. Impelemntasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, Wahab (1997:59) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Kebijakan yang telah direncanakan dan dirumuskan tentunya harus diimplementasikan agar manfaatnya bisa dirasakan. Tentang masalah implementasi kebijakan ini, Webster (2005:64) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, perintah eksekutif, keputusan peradilan).

Dalam konteks implementasi kebijakan ini, selanjutnya Edwards (1980) (dalam Iskandar, 2005:123) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat 4 (empat) faktor kritis yang mendukung, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, atau sikap, dan stuktur birokrasi. Komunikasi menunjukan peranan penting sebagai acuan. agar pelaksanaan

kebijakan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan, sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Pertama, variabel komunikasi menunjukkan peranan penting sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Berarti komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Kedua. Variabel faktor sumber daya. Variabel ini bukan hanya mencakup faktor sumber daya manusia/aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya material lainnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjelaskan tesis bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif.

Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana yang diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya, serta mereka juga mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Keempat, variabel struktur birokrasi merupakan variabel terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Dalam hal ini ada dua karakteristik birokrasi yang umum, yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta fragmentasi dalam pertanggungjawaban diantara berbagai unit organisasi.

Variabel lain dalam penelitian ini adalah terkait dengan manajemen keuangan. Istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang sebaik mungkin. Setiap organisasi selalu membutuhkan manajemen karena tanpa manajemen yang efektif tak akan ada usaha yang berhasil cukup lama. Manajemen akan memberikan efektivitas pada usaha manusia (Anoraga, 1997 : 109).

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat/seni dan profesi. Menurut John F. Mee 1962 (dalam Anoraga, 1997 : 109) menyatakan bahwa manajemen adalah “ *Management is the art of securing maximum result with minimum of efforts as to secure maximum prosperity and happiness for both employer and employee and give the public the best possible service*” (Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat). Sedangkan menurut George F. Terry (1966, dalam Anoraga, 1997 : 109) “ *Management is distinct process consisting of planning, organizing, actuating, controlling, utilizing in each both science and art and follow in order to accomplish predetermined objectives*” (Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakantindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula).

Hal yang sama diungkapkan oleh Skinner dan Ivancevich (1992, dalam Anoraga, 1997: 110) menyatakan bahwa manajemen adalah “*Management will be defined as the application of planning, organizing, staffing, directing, and controlling functions in the most efficient manner*

*possible to accomplish objectives*” (Manajemen dapat didefinisikan sebagai penggunaan perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai sasaran). Kemudian Mary Parker Follet (dalam Handoko, 2001 : 8) menyatakan bahwa definisi manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Menurut Skinner (1992, dalam Anoraga, 2004: 114) merumuskan bahwa fungsi manajemen meliputi : [1] perencanaan (*planning*), [2] pengorganisasian (*organizing*), [3] pengerjaan (*staffing*), [4] pengarahan (*directing*), [5] pengendalian (*controlling*). Sedangkan menurut Stephen P. Robbin (1993, dalam Anoraga, 1997: 115) merumuskan bahwa fungsi manajemen meliputi: [1] perencanaan (*planning*), [2] pengorganisasian (*organizing*), [3] memimpin (*leading*), dan [4] pengendalian (*controlling*). Hal yang senada juga diungkapkan oleh Fattah (1999 : 13) menyebutkan bahwa kegiatan manajerial meliputi banyak aspek, namun aspek utama dan esensial yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Manajemen keuangan merupakan suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan putusan dan manajemen sumberdaya yang tepat (Emery et al., 2004:3). Rahardjo (2001:6) menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah akuisisi, manajemen, dan pembiayaan terhadap sumberdaya-sumberdaya bagi badan usaha dengan menggunakan uang dan berhubungan dengan harga-harga di pasar ekonomi eksternal.

Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan,



pertanggungjawaban dan pelaporan Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah terkait dengan partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan. Partisipasi adalah keikutsertaan, peranserta tau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya (Sastropetro;2006). Participation becomes, then, people's involvement in reflection and action, a process of empowerment and active involvement in decision making throughout a programme, and access and control over resources and institutions (Cristóvão, dalam Mardikanto 2003:23).

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill. Hoofsteede (1971) menyatakan bahwa patisipasi adalah the taking part in one ore more phases of the process sedangkan Keith Davis (1996) menyatakan bahwa patisipasi “as mental and emotional involment of persons of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them” Verhangen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

Theodorson dalam Mardikanto (2003) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok

sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan.

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep man-centered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

Dusseldorp dalam Hetifah Sj. Soemarto (2003) membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan sebagai berikut: 1). Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri. 2). Partisipasi

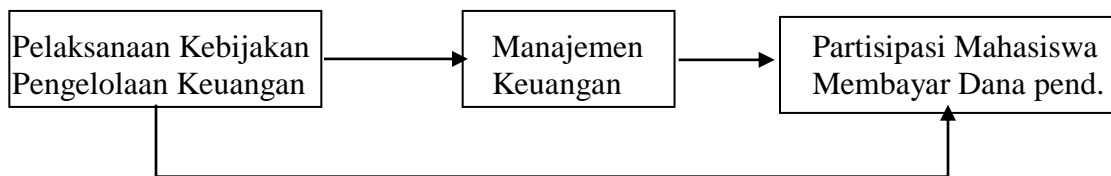
terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar; meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. 3). Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperanserta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya. 4). Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. 5). Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa proposisi atau yang menjadi anggapan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain:

1. Pendidikan merupakan proses produksi yang menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga diperlukan pengelolaan pembiayaan agar mutu dari lulusan dapat bersaing di dunia kerja. Dalam meningkatkan mutu lulusan diperlukan dukungan yang kuat dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan. Dari sekian banyaknya kriteria untuk meningkatkan mutu lulusan tidak terlepas dari penggunaan uang dalam terselenggaranya proses pendidikan. Sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang.
2. Partisipasi atau keterlibatan dan kesadaran mahasiswa dalam membayar keuangan pendidikan, merupakan wujud kesadaran akan pentingnya pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Hal ini disadari karena keuangan pendidikan dimanfaatkan untuk kepentingan dan peningkatan pelayanan pendidikan bagi mahasiswanya.

3. Pemanfaatan keuangan pendidikan dapat dirasa manfaat dan efektif dalam arti pemanfaatan keuangan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dilapangan, apabila ada perencanaan dan penganggaran yang jelas. Oleh karena itu manajemen keuangan merupakan hal penting dalam pengelolaan pendidikan, terlebih lagi di perguruan tinggi yang sebagian besar sumber keuangan dan biaya pendidikan dibebankan pada mahasiswanya.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini penulis rumuskan pada model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1  
Model Penelitian

### 1.5.2 Hipotesis

Hipotesis utama yang dapat dinyatakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho = Terdapat pengaruh pelaksanaan Kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap manajemen keuangan dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan

Ha = Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan Kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap manajemen keuangan dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan

Berdasarkan hipotesis utama tersebut, penulis jabarkan dalam sub-sub hipotesis sebagai berikut:

1. Ho = Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan

perguruan tinggi swasta terhadap manajemen keuangan

Ha = Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap manajemen keuangan

2. Ho = Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan

Ha = Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan

3. Ho = Terdapat pengaruh manajemen keuangan terhadap partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan

Ha = Tidak terdapat pengaruh manajemen keuangan terhadap partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan tentang Fenomena Penelitian**

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa karena disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, lulusan perguruan tinggi akan memosisikan diri atau diposisikan masyarakat sebagai calon pemimpin, baik diperusahaan, masyarakat atau di instansi pemerintah; kedua, produk jasa pemikiran perguruan tinggi dianggap berperan dalam menentukan konsep pembangunan bangsa.

Menurut R. Bowen (1981:1) *in our thoroughly monetized, cost usually appear in the form of expenditures of money. They are payments made to acquire goods and services. For example, as consumers we refer to the costs of a new automobile as the amount of money we must pay for it; producers of automobiles refer to cost as the amount of money paid the thousands of workers, materials, and services needed to produce automobiles.*

Maksudnya bahwa biaya biasanya muncul dalam bentuk pengeluaran uang yaitu pembayaran untuk mendapatkan barang dan jasa. Demikian juga halnya dalam biaya di perguruan tinggi salah satunya pada jenjang diploma biasanya berupa bayaran uang untuk memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan untuk operasionalisasi penyelenggaraan institusi PT. Pengertian ini meliputi pembayaran uang tunai untuk membayar gaji personel, pembelian barang dan jasa, bantuan finansial mahasiswa, dan akuisisi atau pemanfaatan seluruh gedung dan perlengkapan lembaga (*plan and equipment*).

Cohn (1979:137) mengatakan biaya pendidikan adalah *cost* yang harus dikeluarkan yaitu perhitungan atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait dalam pendidikan. Secara teoritis konsep biaya di bidang lain mempunyai kesamaan dengan bidang pendidikan, dimana lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian dan keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang

dimiliki seorang lulusan. Kegiatan pendidikan sebenarnya dipandang sebagai pelayanan (*service*) terhadap siswa atau peserta didik selama belajar. Pendidikan sebagai proses produksi yang menghasilkan lulusan yang berhasil dapat ditentukan oleh jumlah pendaftar dan komponen input dalam suatu sistem pendidikan (Nanang Fattah, 2004:16).

Karena pendidikan merupakan proses produksi yang menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga diperlukan pengelolaan pembiayaan agar mutu dari lulusan dapat bersaing di dunia kerja. Dalam meningkatkan mutu lulusan diperlukan dukungan yang kuat dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan. Dari sekian banyaknya kriteria untuk meningkatkan mutu lulusan tidak terlepas dari penggunaan uang dalam terselenggaranya proses pendidikan. Sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang.

Menurut Abubakar dan Taufani (2008:255) uang dapat dipandang ibarat darah dalam tubuh manusia yang mati hidupnya ditentukan oleh sirkulasi darah dalam tubuhnya. Uang termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar dapat membantu pencapaian tujuan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan pada pendidikan tinggi dapat dibedakan atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. ([bsnp-indonesia.org/id/](http://bsnp-indonesia.org/id/))

Untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan, diperlukan manajemen dalam pengelolaan biaya pendidikan. Menurut R. Bowen (1970) bahwa biaya diperguruan tinggi (PT), biasanya berupa pembayaran dalam bentuk uang untuk mengoperasikan lembaga tersebut, termasuk adanya biaya upah dan gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, alat peraga bagi mahasiswa, pemeliharaan peralatan dan sebagainya.

Pengaturan biaya pendidikan di perguruan tinggi (PT) salah satunya adalah perguruan tinggi berkaitan dengan insentif dan tingkah laku kelembagaan PT untuk menghasilkan banyaknya kegiatan dari tahun ke tahun. Menurut R. Bowen (1970) dapat diasumsikan mengenai pengaturan-pengaturan biaya pada PT sebagai berikut:

- a. Tujuan kelembagaan yang ideal adalah pendidikan yang *excellence prestige* dan bersikap *influence*. Yang dimaksud *excellence* atau disebut *Quality* suatu kelembagaan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : rasio karyawan dengan mahasiswa, penghasilan karyawan, jumlah doktor pada fakultas, jumlah buku di perpustakaan, fasilitas peralatan yang memadai dan kualifikasi mahasiswa di PT tersebut. Kriteria-kriteria ini adalah input untuk menghasilkan unit cost dalam bentuk uang, dalam hal ini bukan sebagai *outcome* dari proses pendidikan.
- b. Yang dinamakan *excellence prestige dan Influence* adalah tidak adanya batasan terhadap jumlah uang suatu lembaga yang bisa dimanfaatkan bagi lajunya pendidikan.
- c. Setiap kelembagaan meningkatkan keseluruhan keuangan yang ia dapatkan. Tidak ada PT yang pernah mengakui mempunyai cukup uang dan semuanya mencoba untuk meningkatkan sumber dana tanpa batas.
- d. Setiap lembaga menghasilkan sumber dana tanpa batas.
- e. Secara kumulatif, keempat pengaturan tertuju pada peningkatan biaya pengeluaran.

Setiap perguruan tinggi perlu menyusun Rencana Anggaran Perbelanjaan Biaya Perguruan Tinggi (RAPBPT). Dalam menyusun rencana anggaran perbelanjaan maka harus diketahui lebih dahulu budget yang tersedia. Budget (rencana) adalah (1) rencana operasional keuangan mencakup estimasi tentang pengeluaran untuk suatu periode/kurun waktu; (2) rencana sistematis untuk efisiensi pemanfaatan tenaga, industry (sumber) dan (3) rencana keuangan yang diprioritaskan pada pola pengawasan operasional pada masa datang suatu lembaga. Aspek fungsional budget menggambarkan kegunaan atau manfaat dari budget adalah : (1) berpengaruh



terhadap motivasi; (2) memungkinkan adanya koordinasi kerja; (3) dapat digunakan untuk kegiatan koreksi/bila terjadi penyimpangan; (4) meningkatkan alokasi sumber; (5) meningkatkan komunikasi; dan (6) sebagai alat evaluasi atau pengawasan.

Menurut Kaplan dan Northon (2001:288) menjelaskan ada 2 faktor yang mempengaruhi anggaran yang dinamis yaitu anggaran operasional dan strategi anggaran. Anggaran operasional adalah anggaran yang berhubungan dengan meramalkan pengeluaran penyelenggaraan program pendidikan baik yang berhubungan dengan manajemen perguruan tinggi maupun manajemen pembelajaran. Anggaran strategi memiliki suatu kekuatan inisiatif untuk mengatasi kesenjangan antara keinginan berperilaku kurang baik dan kemauan keras untuk mencapai kesenjangan antara keinginan berperilaku kurang baik dan kemauan keras mencapai sesuatu melalui peningkatan yang berkesinambungan. Strategi ini dimulai dengan menyusun suatu formulasi program yang dapat dikerjakan, kemudian dapat diukur tingkat pencapaian maupun kualitas cari capaian tersebut. Agar keberlanjutan dapat terjamin, senantiasa dilakukan evaluasi, diambil tindakan selanjutnya dan tidak mengulangi kesalahan.

Menurut Robert R. Bowen (1970) mengenai gambaran distribusi prosentase dari pengeluaran pada institute pendidikan tinggi.

Klasifikasi Pengeluaran	Gaji	Alat dan Pelayanan
1. Pendidikan	39,80 %	19,10 %
2. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	10,90 % 2,70 %	7,90 % 13,70 %
3. Tenaga Bantuan	4,00 %	2,90 %
4. Layanan Kesehatan		
Total	57,40%	43,60 %

Sebagai contoh pengelolaan dana dengan sistem alokasi pembiayaan pada jenjang diploma konsentrasi manajemen besaran dana alokasi pada salah satu perguruan tinggi di Garut dapat digambarkan melalui Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut:

Besaran dana alokasi	Peruntukan alokasi pembiayaan
20 %	Pengadaan/pemeliharaan sarana fisik (ruang kuliah, kantor dan laboratorium)
10 %	Fasilitas pendidikan (alat kuliah, kantor dan lain-lain)
2 %	Keperluan buku-buku perpustakaan
3 %	Penyusunan administrasi pendidikan tinggi dan kurikulum
2,5 %	Keperluan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
2,5 %	Kegiatan ilmiah, penataran, lokakarya, seminar
2,5 %	Kegiatan Kemahasiswaan
10 %	Perhimpunan dana
45 %	Pembayaran honor tenaga edukatif dan administratif dan tenaga struktural lainnya
2,5 %	Anggaran lainnya

Pengelolaan dana bukan hanya sekedar mengarah pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien, tetapi juga dengan dana tersebut perguruan tinggi harus mampu meningkatkan mutu lulusannya dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang lainnya. Dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”.

Keadilan maksudnya bahwa dana yang disediakan oleh pemerintah untuk keperluan pendidikan berasal dari masyarakat dan kekayaan negara. Oleh karena itu harus dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara adil. Andil dalam hal ini ialah diusahakan semua anggota masyarakat mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang sama, baik bagi mereka yang cacat (tuna), tidak mampu, maupun yang kaya.

Efisiensi maksudnya harus dilaksanakan di semua instansi, termasuk dalam bidang pendidikan, Terutama dalam penyelenggaraan pendidikan itu sangat terbatas. Efisiensi selalu membandingkan dua hal, yaitu masukan dengan keluaran. Dalam hal ini biaya pendidikan dapat mengukur efisiensi dengan membandingkan *cost* dengan *outcome*.

Keterbukaan dalam pengelolaan pendidikan maksudnya tidak harus semua terbuka tetapi ada beberapa hal yang hanya diketahui oleh beberapa pimpinan saja dengan tujuan untuk menghindarkan kecurigaan. Dalam rangka keterbukaan, program-program yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi perlu diinformasikan kepada *stakeholders*, dari mana dana yang diperoleh untuk melaksanakan program tersebut, seberapa besarnya dan sasaran yang ingin dicapainya. Melalui keterbukaan ini diharapkan mereka merasa memiliki dan arena itu mereka ikut bertanggungjawab dan memiliki komitmen menyelesaikan program – program yang telah diurusnya.

Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan maksudnya bahwa sebagian dana operasional dalam penyelenggaraan perguruan tinggi diperoleh dari masyarakat, sehingga penggunaan dana itu perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penyelenggaraan perguruan tinggi adalah usaha yang terkait dengan kepercayaan, Karen itu kepercayaan harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini meliputi pertanggungjawaban fisik dan non fisik. Fisik meliputi bangunan apa saja yang dimiliki, peralatan apa saja yang telah dipunyai untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik untuk mahasiswa maupun sivitas akademika yang lain. Non fisik meliputi pengetahuan, keterampilan, dan ilmu apa saja yang telah diperoleh lulusannya, serta hasil yang didikan lainnya berupa moral, nilai-nilai, budaya, sikap emosi, motivasi dan watak lulusan Hasil ini dapat dilihat setelah mahasiswa lulus dan terjun ke masyarakat sebagai *outcome*.

Untuk menunjukkan akuntabilitas, perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta perlu membuat laporan berkala tentang penyelenggaraan serta penggunaan dana yang diperolehnya. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada pemberi anggaran baik itu pemerintah maupun masyarakat, dan dalam hal PTS kepada Yayasan Penyelenggara pendidikan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan.

Salah satu sumber dana terpenting bagi perguruan tinggi swasta adalah terlatak pada mahasiswanya. Oleh karena itu seringkali keberlangsungan suatu perguruan tinggi akan ditentukan dari dana atau biaya pendidikan mahasiswanya. Partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan merupakan harapan yang senantiasa diupayakan dengan berbagai macam cara. Namun demikian dalam tataran realitas partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan mahasiswa yang masuk dalam suatu perguruan tinggi tidak berasal dari satu kondisi atau keadaan ekonomi yang mapan saja, akan tetapi sering pula berasal dari keluarga yang secara ekonomi berada pada tataran menengah ke bawah. Kondisi ini yang menjadi satu masalah yang seringkali dihadapi oleh perguruan tinggi swasta.

## **2.2 Relevansi Masalah Penelitian dengan Administrasi Negara**

Permasalahan utama yang dikaji dalam pembahasan ini yaitu implementasi kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta, manajemen keuangan dan partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan, dalam kajian administrasi negara mempunyai kedudukan dan relevansi yang sangat erat dengan wilayah pembahasan administrasi negara dan kebijakan publik. Untuk melihat kedudukan dan relevansi masalah utama penelitian dengan wilayah kajian dimaksud dapat dilihat pada uraian teoritis berikut tentang administrasi negara dan kebijakan publik.

Mengawali pembahasan tentang administrasi negara dimulai dengan menjelaskan mengenai arti dari administrasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Administrasi dapat digolongkan ke dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terbatas pada kegiatan surat menyurat, pencatatan, pembukuan ringan dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama dari sekelompok orang secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Administrasi dalam arti luas, dikemukakan sebagai berikut;

1. Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Administrasi adalah proses penentuan dan pencapaian sasaran dengan memanfaatkan sumber yang ada secara berdaya guna bersama-sama dan melalui orang-orang yang terkoordinasikan.
3. Administrasi meliputi kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan melengkapi usaha kerjasama sekelompok orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu (Ordway Tead, dalam Widjaja, 2002 :8).

Pada prinsipnya dari pernyataan tersebut adalah (1) Administrasi merupakan proses pelaksanaan kerjasama; (2) Administrasi didukung oleh sekelompok orang yang bekerjasama; (3) Administrasi mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama. Dalam pembahasan ini yang dimaksudkan dengan administrasi adalah administrasi dalam arti luas yaitu Administrasi Negara. Selanjutnya pengertian Administrasi Negara, beranjak dari definisi administrasi dalam arti luas, seperti yang dikemukakan oleh Suradinata (1998 : 1-2) bahwa :

Administrasi negara atau *public administration* dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan; yaitu kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara dan tingkat pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi dalam suatu negara, oleh karena itu administrasi negara mencakup berbagai aspek kegiatan termasuk proses suatu *species* dalam lingkungan pemerintahan yang mencakup makna sebagai kegiatan manusia yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya

White (dalam Iskandar, 2005 : 17) menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara (*public administration consists of all those operations having for their purpose the fulfillment and enforcement of public policy*).

Perkembangan lebih lanjut seiring dengan terjadinya fenomena baru berupa perubahan-perubahan birokrasi ke arah paradigma baru, memandang bahwa organisasi pemerintahan tidak hanya melakukan pemenuhan akan barang publik tetapi juga melakukan motivator bagi bertumbuh kembangnya peran serta masyarakat.

Pengaruh perubahan tersebut ditandai oleh pergeseran nilai (*shift of value*), keterhubungan (*interconnected*) dan ketidakpastian (*unprediction*) dalam berbagai kehidupan, untuk itu diperlukan kearifan dalam menentukan strategi dan kebijakan. Dalam hal ini peranan administrasi sangat penting, karena kaitannya sangat erat dengan perumusan berbagai kebijakan negara serta implementasinya.

Sebagian besar persoalan administrasi negara merupakan suatu sistem untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang senantiasa berkembang, sehingga ketidakpuasan masyarakat dapat diperkecil dan disempitkan jaraknya. Jika persoalan tersebut dapat dipecahkan maka tujuan yang telah digariskan dapat tercapai.

Siagian (1999 : 8) menyatakan bahwa administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara melalui implementasi kebijakan publik. Berkenaan dengan masalah kebijakan publik, Easton (dalam Islamy, 1999 :19) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (*the authoritative allocation of values for the whole society*).

## 2.3 Tinjauan Teoretik Variabel Penelitian

### 2.3.1 Tinjauan Pelaksanaan Kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan

#### 1. Konsep Kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan

Terminologi kebijakan publik (*public policy*) itu, ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana memandang. Salah satu definisi kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. (*The authoritative allocation of values for the whole society*). Berdasarkan definisi ini, Easton (1965:23) menegaskan, bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut, diwujudkan dalam pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Bahkan Dye (dalam Singadilaga, 2003:4) menegaskan, bahwa kebijakan publik, adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do* )

Lasswell dan Kaplan (1970 : 71) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (*a projected program of goal, values and practices*). Demikian pula Anderson (1979 : 3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku atau guna memecahkan suatu masalah tertentu. (*A purposive course of action followed by an actor on set at actors in dealing with a problem or matter of concern*).

Lebih lanjut Anderson (1979 : 3) menyebutkan bahwa terdapat implikasi-implikasi dari adanya pengertian kebijakan negara tersebut yaitu :

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan.

2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti; merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa.

Kebijakan publik, paling tidak dalam bentuknya yang positif, pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (*Community as a whole*) dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta (Solichin, 2002: 17)

Menurut pemahaman Jones (2001 : 46) kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan dengan tujuan (*goal*), program (*program*), keputusan (*decision*), hukum (*law*), proposal (*proposal*) dan maksud besar tertentu (*the large certain goal*). Lebih lanjut mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Secara teoritis, harus dibedakan antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*). Namun demikian dalam tingkat praktek, antara kedua konsep tersebut, cenderung untuk dicampuradukkan, padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Tjokroamidjojo (2001 : 5) membedakan pengertian pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan, dengan menyatakan, “Pembentukan kebijakan atau *policy formulation* sering pula disebut *policy making* dan ini berbeda dengan pengambilan keputusan (*decision making*). Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa, “pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan suatu



alternatif dari berbagai alternatif. Sedangkan pembuatan kebijakan (*policy making*) meliputi banyak pengambilan keputusan.

Guna kepentingan analisis suatu kebijakan, Eulau dan Prewitt (dalam Jones, 2001 : 48) membedakan kebijakan dari komponen umum kebijakan, sebagai berikut :

- a. Niat (*intentions*) : tujuan-tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan
- b. Tujuan (*goals*) : keadaan akhir yang hendak dicapai
- c. Rencana atau usulan (*plans or proposal*) ; cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan
- d. Program ; cara yang disahkan untuk mencapai tujuan
- e. Keputusan atau pilihan (*decision or choices*) ; tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
- f. Pengaruh (*effects*) ; dampak program yang dapat diambil yang diharapkan dan tidak diharapkan, yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder

Jika demikian halnya, maka definisi kebijakan itu tidaklah semata-mata dilihat dari sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, karena dalam perkembangannya lebih lanjut, pemahaman terhadap kebijakan publik itu, tidak diartikan secara tradisional, menyangkut tindakan-tindakan pemerintah akan tetapi kebijakan publik dalam wujud peraturan perundang-undangan (*rule*) telah dipandang sebagai barang-barang publik (*public goods*). Operasionalisasi “*rule*” sebagai barang publik, adalah fungsinya sebagai kompensasi atas kegagalan berbagai mekanisme koordinasi mekanisme pasar dan mekanisme sosial (Sudarsono, 1994 : 17).

Adanya suatu kebijakan publik yang pada gilirannya menghasilkan peraturan perundangan (*rule*) sebagai barang-barang publik (*public goods*), dalam pengertian lain bahwa kebijakan publik dalam bentuk yang konkrit sebagai “peraturan perundangan”, telah dipandang sebagai suatu hal yang menyangkut kepentingan publik, walaupun dalam banyak hal pemerintah seringkali gagal menghasilkan hasil yang diinginkan, jika dilihat dari kacamata kepentingan publik (Barzeley, 1992 : 119).

Kondisi demikian menurut Sudarsono, (1994 : 18) disebabkan oleh, “ciri lain dari *rule* yang sifatnya tidak lengkap (*incompleteness*), hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dalam mengantisipasi problem kepentingan masa mendatang, itulah sebabnya *rule* harus diperbaiki.

Apabila “*rule*” sebagai barang publik sudah dipandang kurang sesuai dengan kepentingan publik (*public interest*), sesuai dengan hirarki proses kebijakan tersebut, jelas *rule* harus senantiasa direvisi, diperbaharui dan diserasikan dengan perkembangan lingkungan global (Sudarsono, 1994 : 18). Sesuai tidaknya sesuatu kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*rule*) dengan kepentingan publik, hal itu akan sangat tergantung kepada penilaian hasil masyarakat (*results citizens value*).

Konstruksi teoritis semacam ini, sebagaimana disebutkan Barzeley (1992 : 119) adalah berhubungan dengan ide organisasi yang berfokus pelanggan, menekankan hasil daripada input dan proses dan mengisyaratkan bahwa apa yang dinilai masyarakat, tidak bisa ditentukan oleh kelompok profesional di pemerintahan. Walaupun Harmon (dalam Islamy, 1999 : 14) pernah mengatakan, bahwa tugas utama administrator publik, mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kepentingan publik, tetapi sayangnya jarang sekali mereka mengenal teori tentang kepentingan publik tersebut.

Keterkaitan administrator publik sebagai “*policy framer*” dengan kepentingan publik, dapat dilihat dari responsivitas administrator publik terhadap masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang ada dilingkungannya. Dengan demikian, administrator yang mempunyai tingkat responsivitas yang tinggi terhadap masalah, kebutuhan dan tuntutan publik serta selalu berupaya secara efektif untuk meningkatkan mutu kebijakan yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan publik, maka administrator itu, bisa disebut sebagai administrator publik yang selalu berorientasi kepada kepentingan publik (Islamy, 1999 : 15).

Dalam tingkat operasional, seringkali beranggapan bahwa jika suatu ketika pemerintah membuat kebijakan tertentu, maka kebijakan tersebut dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan dan hasil-hasilnya pun, akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Pandangan demikian, ternyata tidak seluruhnya betul, sebab di negara-negara dunia ketiga menurut Smith (dalam Solichin, 2002 : 100), implementasi kebijakan publik, justru merupakan batu sandungan terberat bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang sosial ekonomi.

Merujuk dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, maka kebijakan pada hakikatnya merupakan kajian terhadap peraturan atau program, dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan itu sendiri selalu dihubungkan dengan upaya penyelesaian masalah, oleh karena itu Anderson (dalam Iskandar, 2004:63) mengemukakan konsep bahwa suatu kebijakan memuat implikasi-implikasi, yaitu :

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan;
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa.

Kebijakan tentang pengelolaan keuangan khususnya di perguruan tinggi swasta merupakan salah satu kebijakan pemerintah (kebijakan publik) yang mengatur mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam suatu perguruan tinggi. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti

misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah, seperti misalnya kelompok-kelompok penekan maupun kelompok-kelompok kepentingan. Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan public. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang disebut oleh David Easton sebagai “penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya.

Menurut Irfan Islami memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Sementara itu, kepentingan publik atau masalah-masalah publik sangat banyak. Masalah-masalah publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama seperti yang diungkapkan oleh Theodore Lowe (Winarno,2002) adalah bahwa masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah prosedural dan masalah substantif. Masalah prosedural berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia, seperti menyangkut kebebasan berbicara, maupun polusi lingkungan.

Pembedaan kedua adalah didasarkan pada asal-usul masalah tersebut. Berdasarkan kategori ini masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah luar negeri dan dalam negeri. Kategori lainnya adalah kategori *jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain*. Berdasarkan kategori ini maka masalah publik dibedakan menjadi masalah distributif, regulatif dan masalah redistributif. Masalah regulasi berkaitan dengan aturan-aturan untuk membatasi tindakan-tindakan pihak tertentu. Masalah distributif adalah masalah distribusi

mencakup sejumlah kecil orang dan dapat diatasi. Sedangkan masalah redistributif adalah menyangkut perubahan-perubahan sumber-sumber antara kelompok atau kelas dalam masyarakat.

Kebijakan publik adalah proses yang di dalamnya terdiri beberapa tahapan, yaitu perumusan masalah (formulasi), implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu menurut William N. Dunn berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri dari : tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Upaya untuk menganalisis suatu kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat dan benar. Hal ini dilakukan dalam upaya mengukur apakah kebijakan publik yang dikeluarkan telah terealisasi dengan baik atau tidak dilapangan. Oleh karena itu dalam menganalisis suatu kebijakan diperlukan satu metode atau pendekatan khusus, sehingga benar-benar mampu mengukur kebijakan yang dikeluarkan.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang pajak adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure)

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori

dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Pengaruh tersebut baik yang terjadi dari dalam maupun dari luar.

Pengelolaan keuangan akan berhubungan erat dengan biaya pendidikan sebagai salah satu sumber dana yang diterima dan dikelola. Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan.

Pembiayaan pendidikan meliputi pembiayaan langsung, dan pembiayaan tak langsung biaya langsung terdiri dari biaya – biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan – kegiatan perkuliahan berupa pembelian alat – alat pembelajaran sarana belajar, biaya transportasi, gaji dosen, pembiayaan penelitian. Sedangkan biaya tak langsung dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikoordinasikan mahasiswa selama belajar. Untuk memperjelas pengertian pembiayaan pendidikan berikut.

Pembiayaan menurut Kotler (1992:21) mengatakan bahwa *Budgeting is that part of planning proses associated with an organization finances* ) pembiayaan merupakan bagian proses perencanaan yang menggabung dalam organisasi pembiayaan.

Mulyadi (2009:8) mengartikan bahwa yang dimaksud dengan biaya dalam arti luas adalah “ Pengorbanan ekonomi yang diukur dalam aturan uang, yang terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu, 4 tujuan dalam definisi biaya

- a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
- b. Diukur dalam satuan uang
- c. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi
- d. Pengorbanan tertentu untuk tujuan tertentu”

Pembiayaan menurut Lindsay D ([Lindsay.http//.www.wisegeek.com/what-is-budgeting.htm](http://www.wisegeek.com/what-is-budgeting.htm)) “ *Budgeting in business sense is the planned allocation of available fund to each departemen within. Budgeting allow to control overspending in less productive areas and put more company asset into areas which generate significant income or good public relations. Budgeting is usually handled during meeting with accountants, financial expert and representative from each department affected by budgeting*”

Pembiayaan pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan tridarma perguruan tinggi, Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh perguruan tinggi dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Belanja perguruan tinggi sangat ditentukan oleh komponen – komponen yang jumlah porsinya bervariasi diantara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain.

Berdasarkan pendekatan unsur pembiayaan perguruan tinggi dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran yaitu, (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan pembelajaran, (2). Pembiayaan untuk tata usaha, , (3),Pembiayaan untuk saran dan prasaran, (4), Pembiayaan untuk pengembangan kurikulum, (5) Pembiayaan penelitian (6) Pembiayaan ksesjahteraan pegawai (7) Pembiayaan administrasi

Pembiayaan baik perguruan tinggi meliputi pembiayaan langsung dan pembiayaan taklangsung pembiayaan langsung , pembiayaan langsung terdiri dari biaya – biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan – kegiatan perkuliahan berupa pembelian alat – alat pembelajaran saran belajar, biaya transportasi, gaji dosen, pembiayaan penelitian. Sedangkan biaya tak langsung dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikoordinasikan mahasiswa selama belajar

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung program pengembangan Jurusan/Departemen disusun berdasarkan eligible cost component. Semua komponen pembiayaan yang diajukan harus terkait secara logis dengan program pengembangan yang diusulkan. Biaya yang diusulkan harus sudah memperhitungkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk program pengembangan Jurusan komponen pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam SP4 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan staf. Komponen biaya ini dapat digunakan untuk program non-gelar (pelatihan atau magang) dalam negeri yang terkait dengan peningkatan kemampuan staf, teknisi maupun pegawai administrasi dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar, memperbaiki pengelolaan pendidikan, memperbaiki kualitas layanan baik administrasi maupun laboratorium. Pendidikan tidak bergelar hendaknya tidak dilakukan di dalam institusi sendiri (*in-breeding*), kecuali ada justifikasi yang kuat dan jelas. Anggaran maksimum untuk pengembangan staf adalah 20% dari pagu anggaran SP4 kompetisi.
- b. Peralatan. Komponen biaya ini diutamakan untuk memperbaiki peralatan yang ada dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaannya. Dengan justifikasi yang jelas, komponen ini dapat digunakan untuk pembelian alat baru. Anggaran maksimum adalah 40% dari pagu anggaran;
- c. Renovasi Bangunan Komponen biaya ini dapat digunakan untuk perbaikan ringan, tanpa menambah volume ruangan, terhadap ruangan yang secara langsung menunjang pelaksanaan program yang diusulkan, misalnya ruangan kelas, laboratorium, ruang baca dll. Anggaran maksimum untuk renovasi bangunan adalah 15% dari pagu anggaran;
- d. Furnitur Komponen biaya ini dapat digunakan untuk melengkapi sarana yang secara langsung menunjang program yang diusulkan, misalnya sarana kelas dan laboratorium. Komponen biaya ini tidak dapat digunakan untuk melengkapi sarana bagi staf pengajar. Anggaran maksimum untuk furniture adalah 10% dari pagu anggaran SP4 kompetisi.



- e. Tenaga ahli. Komponen ini dapat digunakan untuk mendatangkan tenaga ahli domestik dan berasal dari luar institusi yang secara khusus ditugaskan untuk memberikan bimbingan dalam suatu bidang kegiatan tertentu, antara lain: metodologi pembelajaran, sistem manajemen internal, pengelolaan laboratorium, dan kegiatan lainnya yang secara langsung menunjang proses belajar mengajar di Jurusan/Departemen. Maksimum dana yang dialokasikan adalah 10% dari pagu anggaran SP4 kompetisi;
- f. Bahan ajar. Komponen pendanaan ini digunakan untuk pembelian buku dan bahan pustaka lain yang secara langsung mendukung proses pembelajaran. Komponen biaya ini tidak dapat digunakan untuk menyusun bahan ajar atau diktat;
- g. Pengembangan Program. Untuk pengembangan Jurusan/Departemen, komponen biaya ini dapat digunakan untuk pelaksanaan *tracer study*, pengembangan sistem jaminan mutu layanan akademik (termasuk sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran), pengembangan prosedur baku operasional (SOP) manajemen laboratorium, pengembangan sistem administrasi akademik, pengembangan pangkalan data, pelaksanaan evaluasi diri, penyusunan rencana strategis pengembangan Jurusan/Departemen,. Alokasi dana maksimum adalah 20% dari pagu anggaran SP4 kompetisi. Setiap kegiatan yang diusulkan harus disertai *Term of Reference* (Kerangka Acuan);
- h. Hibah pengajaran. Komponen biaya ini dapat digunakan untuk memperbaiki metode pembelajaran, termasuk penyediaan bahan ajar secara utuh dan pengembangan *delivery system* dan evaluasinya. Hibah dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester (di luar proses seleksi). Satuan biaya kegiatan ini adalah Rp. 5.000.000 per hibah. Jumlah hibah yang dapat diusulkan oleh setiap Jurusan/Departemen adalah maksimum 25% dari total staf permanen, akan tetapi alokasi anggaran tidak melebihi 10% dari pagu anggaran SP4
- i. Manajemen Program. Komponen ini ditujukan untuk mendukung penanganan dan administrasi pelaksanaan program, termasuk diantaranya adalah honor untuk pengurus inti

pelaksana program dan bahan habis pakai, komunikasi dan perjalanan yang terkait dengan pelaksanaan program. Komponen ini adalah sebesar 7% dari total usulan anggaran yang bersumber dari SP4 kompetisi. Kebutuhan dana untuk manajemen program dipenuhi dari dana pendamping

Pembiayaan perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor : 12 tahun 20012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 88 dan 89 bahwa “ Pembiayaan perguruan tinggi bersumber

1. Pembiayaan perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri.
2. Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :
  - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
  - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
  - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;
  - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non-Pemerintah; dan
  - f. penerimaan dari masyarakat lainnya.
4. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.

## **2. Dimensi Kebijakan tentang Partai Politik**

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards (1980:10-20) sebagai berikut :

### **a. Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

### **b. Sumerdaya**

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan

program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun

pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- 2) Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
- 4) Vitalitas suatu organisasi;
- 5) Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

### **2.3.2 Manajemen Keuangan**

## 1. Konsep Manajemen

Manajemen menurut Salam (2007 : 12) adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. Dengan demikian manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik internal, eksternal, sarana, prasarana, alat, barang, maupun fungsi dan kedudukan (jabatan) dalam organisasi yang diatur sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasi.

Nawawi (2008) mengemukakan manajemen adalah proses pengaturan, pengurusan dan pengelolaan dengan memanfaatkan orang lain dalam penegelolaan sumber daya untuk pencapaian suatu tujuan.

Dalam gerak organisasi, manajemen mempunyai peranan yang penting. Bila dilihat dari segi aliran fungsi dalam organisasi, manajemen berperan setelah ditetapkannya kesepakatan oleh dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (administrasi), kemudian dibentuklah wadah kesepakatan tersebut dalam bentuk perserikatan kerja sama (organisasi). Agar organisasi tersebut dapat bekerja efektif dan efisien maka dibuatlah cara-cara kerja organisasi tersebut disebut dengan manajemen. Karena itu dapat dikatakan bahwa inti dari administrasi adalah organisasi, dan inti dari organisasi adalah manajemen.

Beberapa definisi lain tentang manajemen menurut para ahli (Syamsi, 1994:58) yaitu : R.C Davis mengemukakan “ management is the function of executive leadership anywhere”. Manajemen itu merupakan fungsi dari kepemimpinan dari organisasi apapun; Newman and Summer mengemukakan “*management is a process as it comprises a series of actipns that lend to the accomplishment of objectives. It is a social process because these actin are principally concerned with relations between people*”. Manajemen merupakan proses yang terdiri dari serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa manajemen mencakup aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, dan dilakukan oleh individu-individu yang memberikan kontribusi terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa manajemen meliputi, pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan dan memahami cara melakukannya, serta mengukur efektivitas usaha mereka. Dengan demikian manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud (intangible). Manajemen dapat dikatakan tidak berwujud, karena tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya atau manfaatnya, yakni output pelayanan yang cukup dan dapat memuaskan pribadi, adanya produk dan pelayanan yang diberikan secara baik.

Dalam mengukur prestasi kerja manajemen, maka diperlukan konsep efisiensi dan efektifitas. Efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan manajemen untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, dimana diperhitungkan ratio antara keluaran atau hasil yang dicapai dengan masukan atau input yang digunakan oleh manajemen, sehingga seorang manajer dikatakan efisien, jika ia menghasilkan atau mencapai output yang lebih besar atau terjadi produktivitas kerja yang tinggi dibanding dengan masukan-masukan (input) yaitu dalam wujud sumber-sumber daya yang digunakan (tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin dan waktu).

Sehubungan dengan uraian di atas, maka Kantor Sekretariat Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mewujudkan misinya diperlukan adanya manajemen yang efektif dan efisien, sehingga sasaran program pembangunan dan kemasyarakatan dapat tercapai dengan maksimal

Oleh karena itu, dalam manajemen diperlukan adanya pemimpin yang mampu menggerakkan staf sehingga terjadi interaksi yang dinamis, bekerja bersama dan saling ketergantungan satu dengan lainnya untuk secara bersama mewujudkan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Selain itu diperlukan adanya penyusunan rencana yang



didasarkan pada berbagai metode, rencana yang logis dan realistis untuk dapat dicapai secara efektif dan efisien. Rencana program harus pula diwujudkan dalam suatu tahapan penyelenggaraan yang efisien dan efektif dan akan dapat pula dikendalikan secara tepat dengan adanya evaluasi untuk mengukur apakah tujuan dan sasaran telah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk maksud tersebut, maka perlu diungkapkan pula tentang bagaimana siklus diktat aparatur dapat diwujudkan.

Pandangan Soewarno tentang manajemen, sejalan dengan pandangan Koontz (dalam Soewarno, 1989: 43), namun Koontz lebih memusatkan perhatiannya pada aspek hubungan antara manajemen dengan pencapaian suatu tujuan. Dalam hubungan ini, manajemen dititikberatkan pada usaha memanfaatkan orang-orang lain dalam pencapaian tujuan. Dengan cara pandang seperti itu, maka orang-orang didalam organisasi harus jelas wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya (*job description*).

Terhadap pandangan di atas, Siagian (1996: 5) menyimpulkan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi. Dalam hubungan ini, dapat dipahami bahwa manajemen tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut "bawahan". Dengan demikian administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan.

## **2. Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau

pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu *memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban* (Lipham, 1985; Keith, 1991)

Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### **3. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip

efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

#### a. Tranparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

#### b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

#### c. Efektivitas

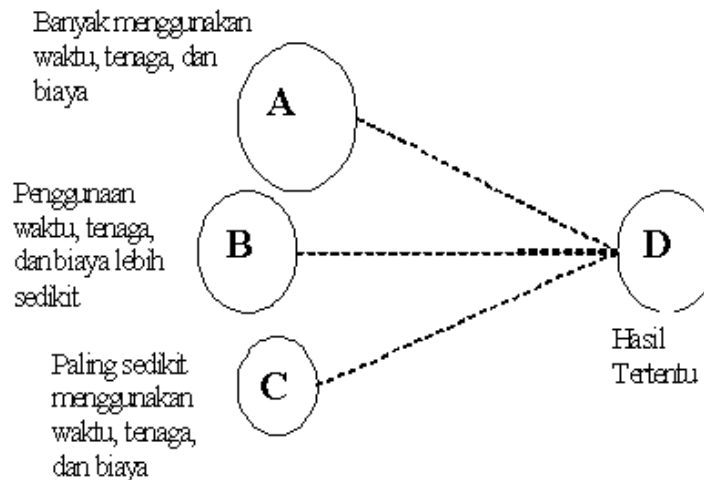
Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. *Effectiveness "characterized by qualitative outcomes"*. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### d. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil kegiatan. *Efficiency "characterized by quantitative outputs"* (Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

(1) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya:

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

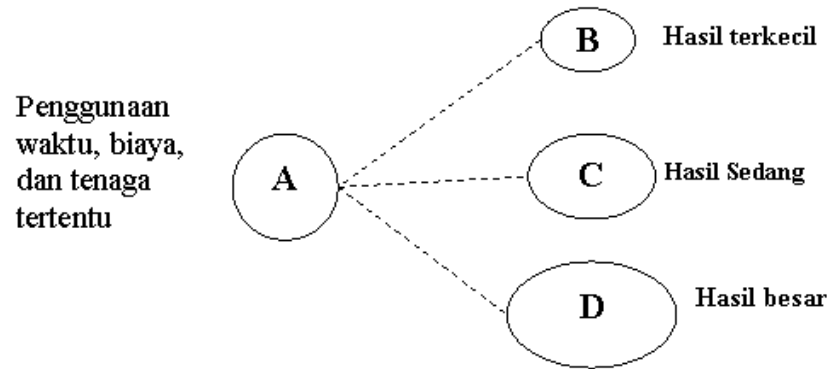


*Hubungan penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan*

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan daya C dan hasil D yang paling efisien, sedangkan penggunaan daya A dan hasil D menunjukkan paling tidak efisien.

(2) Dilihat dari segi hasil

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Ragam efisiensi tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:



*Hubungan penggunaan waktu, tenaga, biaya tertentu dan ragam hasil yang diperoleh*

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil B paling tidak efisien. Sedangkan penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil D paling efisien. Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

#### **4. Fungsi Manajemen Keuangan**

Gullick (dalam Siagian, 1996: 104) mengembangkan fungsi administrasi dan manajemen menjadi tujuh fungsi yaitu: (1) *planning* (perencanaan), (2) *organizing* (pengorganisasian), (3) *staffing* (pengadaan tenaga kerja), (4) *directing* (pemberian bimbingan), (5) *coordinating* (pengkoordinasian), (6) *reporting* (pelaporan), (7) *budgeting* (penganggaran). Dalam konsep fungsi-fungsi manajemen ini menunjukkan bahwa Gullick mengembangkan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen yang telah dikemukakan oleh Fayol dengan memperlunak istilah "*commanding*" menjadi "*directing*", "*controlling*" menjadi "*reporting*", dan menambahkan dua point yaitu, *staffing* dan *budgeting*.

Kemudian Millet (dalam Siagian, 1996 : 104), menyederhanakan konsep fungsi-fungsi manajemen yang telah diajukan oleh Fayol dan Gullick, dimana Millet mengklasifikasikan fungsi organik administrasi dan manajemen hanya dua golongan, yaitu "*directing*" dan

"*facilitating*". Dalam hal ini Millet memandang bahwa "*directing*" (pemberian bimbingan) kepada bawahan sebagai fungsi yang maha penting bagi seorang pimpinan.

Fayol (dalam Siagian, 1996 : 103) merinci lima fungsi administrasi dan manajemen, yaitu (1) *planning* (perencanaan), (2) *organizing* (pengorganisasian), (3) *commanding* (pemberian komando), (4) *coordinating* (pengkoordinasian), dan (5) *controlling* (pengawasan). Kelima fungsi administrasi dan manajemen tersebut, didasarkan pada kondisi masyarakat yang militeristik di Prancis pada waktu itu, sehingga Fayol menjadikan "*commanding*" sebagai salah satu fungsi Administrasi dan Manajemen.

Jika Fayol mengemukakan lima fungsi administrasi dan manajemen, dan Gullick tujuh fungsi, maka Terry (dalam Siagian, 1996: 105), mengklasifikasikan empat fungsi-fungsi manajemen, yaitu: (1) *planning* (perencanaan), (2) *organizing* (pengorganisasian), (3) *actuating* (penggerakan), (4) *controlling* (pengawasan). Dalam hal ini, Terry. menggunakan istilah "*actuating*" sebagai fungsi yang menunjukkan proses penggerakan bawahan, yang berarti usaha mendapatkan hasil dengan penggerakan barang lain. Istilah ini lebih lunak dari istilah "*commanding*" yang dikemukakan oleh Fayol, dan istilah "*directing*" oleh Gullick.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis cenderung menggunakan pendekatan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen yang dikemukakan oleh Terry sebagai rujukan dalam menjelaskan hubungan fungsi-fungsi manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang mencakup

#### a. *Perencanaan (Planning)*

Menurut Konzt (dalam Sarwoto, 1988: 68), perencanaan adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan/mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengertian tersebut, terkandung makna bahwa pada hakekatnya aspek perencanaan senantiasa terdapat dalam setiap jenis usaha manusia. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-

baiknya (maximum output) dengan memberdayakan semua sumber daya yang ada agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Soekartawi (1990:26), memandang bahwa perencanaan merupakan alat dari pembangunan, karena perencanaan merupakan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan dan perencanaan sebagai tolok ukur dari berhasil tidaknya pembangunan tersebut. Makna yang dapat ditarik dari pendapat tersebut, adalah bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh baik buruknya perencanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, Handoko (1999: 23), mendefinisikan perencanaan sebagai; (1) pemilihan atau penetapan tujuantujuan organisasi, dan (2) penentuan strategis, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perencanaan tidak dapat terlepas dari kegiatan pengambilan keputusan dan penentuan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan organisasi, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, semua fungsi manajemen lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, dimana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa ada perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinyu. Sebaliknya, perencanaan yang baik tergantung pada pelaksanaan yang efektif terhadap fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Dari beberapa pengertian perencanaan yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam upaya mencapai suatu tujuan dengan baik. Dengan kata lain, perencanaan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, pada hakekatnya aspek perencanaan senantiasa terdapat dalam setiap jenis kegiatan.

*b. Pengorganisasian (Organizing)*



Kegiatan pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen dalam suatu organisasi yang memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi sesuai yang diharapkan. Dimana setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. Hal itu sejalan dengan pandangan Money (dalam Sarwoto, 1988 : 68) menegaskan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. .

Pengertian di atas, dipertegas oleh Handoko (1999 : 24), bahwa pengorganisasian (*organizing*) adalah : (1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, (3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, (4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan demikian, fungsi pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen adalah menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. Oleh karena itu, seorang manajer atau pimpinan perlu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan tipe organisasi yang sesuai dengan tujuan, rencana dan program yang telah ditetapkan. Dengan kata lain perbedaan tujuan yang ingin dicapai akan membutuhkan jenis organisasi yang berbeda pula.

### c. Penggerakkan (*Actuating*)

Penggerakkan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana Siagian (1984 : 67) menjelaskan bahwa penggerakkan (*motivating*) sebagai "keseluruhan proses

pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis". Dalam penjelasan tersebut, terkandung makna bahwa penggerakan (motivating) adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin membangkitkan semangat dan gairah kerja, disiplin kerja, tanggung jawab, kesungguhan, dan keikhlasan bawahan melaksanakan pekerjaannya dalam rangka tercapainya tujuan organisasi sesuai yang telah direncanakan.

Dari rumusan ini, dapat dipahami bahwa pelaksanaan melibatkan semua sumber daya organisasi baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peralatan, metode kerja, dan peraturan-peraturan. Dapat dipahami bahwa pelaksanaan atau implementasi adalah suatu proses interaksi antara penetapan tujuan dan tindakantindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain pelaksanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi, sumber daya manusia sebagai pelaku utama perlu diberi digerakkan atau diberi motivasi sehingga segala kemampuan yang dimiliki dapat dicurahkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

#### *d. Pengawasan (Controlling)*

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dari tiga fungsi manajemen lainnya yang telah dikemukakan di atas yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dirumuskan oleh Siagian (1998 : 135) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari sebuah kegiatan administrasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dikerjakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Siagian agak berbeda dengan Latif (1981 : 14) yang menekankan bahwa pengawasan dilaksanakan di dalam hal-hal yang spesifik, yaitu apabila ada penyimpangan dari perencanaan. Walaupun ada perbedaan dalam pelaksanaannya,

namun keduanya mengakui bahwa pengawasan mengandung pengertian koreksi dan mengadakan revisi pada perencanaan, dan dalam melakukan pengawasan, tahap-tahap yang penting adalah: 1). Mempersiapkan standar dalam menyusun strategi. 2). Mengadakan pengecekan dan pelaporan dari setiap usaha. 3). Mengadakan koreksi pada pelaksanaan.

Menurut Fremont (1991: 730), pengawasan mempunyai berbagai konotasi yang bermakna yaitu: 1). Mengecek atau memeriksa, 2). Mengatur, 3). Membandingkan dengan suatu standar, 4). Melaksanakan wewenang dan 5). Mengekang dan mengendalikan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat terlihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Dimana pengawasan merupakan suatu usaha untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan-tindakan korektif jika diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, tanpa ada perencanaan, maka pengawasan tidak mungkin dilaksanakan, karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan tersebut, dan rencana ke pengawasan akan timbul penyimpangan-penyimpangan yang serius, tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Secara umum pengertian pengawasan adalah tindakan yang bertujuan untuk memastikan apakah sumber daya dalam suatu organisasi baik manusia maupun peralatan (sarana dan prasarana) dapat didayagunakan dengan baik dan sesuai tujuan yang telah direncanakan

### **2.3.3 Partisipasi Mahasiswa**

#### **1. Pengertian Partisipasi**

Partisipasi adalah keikutsertaan, peranserta tau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya (Sastropetro;1995). Participation becomes, then, people's involvement in

reflection and action, a process of empowerment and active involvement in decision making throughout a programme, and access and control over resources and institutions (Cristóvão, 1990).

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil (PTO PNPM PPK, 2007). Hoofsteede (1971) menyatakan bahwa partisipasi adalah *the taking part in one or more phases of the process* sedangkan Keith Davis (1967) menyatakan bahwa partisipasi *“as mental and emotional involvement of persons of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them”*. Verhangen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan (Berlo, 1961). Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran

serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep man-centered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

## **2. Tipologi dan Tahap Partisipasi**

Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat “sulit diajak maju” oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa. Berikut adalah macam tipologi partisipasi masyarakat

- a. Partisipasi Pasif / manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelkasan proyek yanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
- b. Partisipasi Informatif memiliki karakteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberikesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akuarasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

- c. Partisipasi konsultatif dengan karakteristik masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembutsn keputusan bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) atau tindak lanjut
- d. Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan korbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan asyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.
- e. Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang di sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
- f. Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman prespektik dalam proses belajar mengajar yang terstuktur dan sisteatis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan merek, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegitan.
- g. Self mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-niloi yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lemabaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan

Sementara itu tahap-tahap partiisipasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal (Mardikanto, 2001).

b. Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan

Slamet (1993) membedakan ada tingkatan partisipasi yaitu : partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumusan tujuan, maksud dan target.

Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis yang berasal dari atas umumnya amat mendalam. Oleh karena keadaan ini, peranan masyarakat sendirilah akhirnya yang mau membuat pilihan akhir sebab mereka yang akan menanggung kehidupan mereka. Oleh sebab itu, sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan teknis atasan (Slamet, 1993).

c. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan (Mardikanto, 2001).

d. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan (Mardikanto, 2001).

e. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang (Mardikanto, 2001).

### **3. Tingkat Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan**



Dusseldorp (1981) membedakan adanya beberapa jenjang partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri. Partisipasi yang spontan adalah partisipasi itu muncul dengan tiba-tiba tanpa dapat diperkirakan sebelumnya.

Partisipasi spontan dalam pembayaran dana pendidikan biasanya dilandasi dengan rasa kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pelaksanaan pendidikan yang jelas-jelas akan tergantung dari dana pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa. Mahasiswa menyadari secara utuh bahwa keuangan atau dana pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa akan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan mahasiswa itu sendiri. Konsep partisipasi spontan dalam membayar dana pendidikan ini dapat terlaksana apabila ditunjang dengan kondisi ekonomi dan adanya kepercayaan pada lembaga dalam pengelolaan keuangan.

- b. Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar; meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.
- c. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperanserta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya.
- d. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.

- e. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

Berbagai partisipasi akan terlaksana dan tercipta dengan baik apabila dipenuhi persyaratan partisipasi sebagai berikut:

- a. Adanya Kemauan

Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya diperlukan sikap-sikap yang:

- 1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan.
- 2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya.
- 3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas sendiri.
- 4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan.
- 5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

- b. Adanya Kemampuan

Robbins (1998) kemampuan adalah kapasitas individu melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut Robbins (1998) menyatakan pada hakikatnya kemampuan individu tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik itu antara lain adalah:

- 1) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah.
- 2) Kemampuan untuk memahami kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

3) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan serta sumber daya lain yang dimiliki

c. Adanya Kesempatan

Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat dipengaruhi oleh:

- 1) Kemauan politik dari penguasa/pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Kesempatan untuk memperoleh informasi.
- 3) Kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya.
- 4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi tepat guna.
- 5) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan mempergunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.
- 6) Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Mardikanto (2003) menjelaskan adanya kesempatan yang diberikan, sering merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan sangat menentukan kemampuannya. Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Sebab, kesempatan dan kemampuan yang cukup, belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk (turut) membangun. Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan dan aktif memburu serta memanfaatkan setiap kesempatan.

Mardikanto (2003) menjelaskan beberapa kesempatan yang dimaksud adalah kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembagunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan; sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah. Selain hal tersebut terdapat kesempatan-kesempatan yang lain diantaranya kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan, kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat (termasuk peralatan perlengkapan penunjangnya). Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan, dan Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.

#### **2.4 Hubungan Konseptual antar Variabel**

Pendidikan merupakan bagian dari *public service* atau jasa layanan umum. Penyelenggaraan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan tinggi membutuhkan perhatian karena melalui pendidikan dapat menghasilkan keahlian dan keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seorang lulusan.

Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari penggunaan dana/biaya. Biaya itu meliputi Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji

pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Karena biaya sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga perguruan tinggi harus menetapkan berapa kisaran dana dari kegiatan pendidikan tersebut yang biasanya dituangkan dengan jelas diawal pada rencana strategis (Resntra) lembaga pendidikan. Setiap perguruan tinggi hendaknya membuat rencana anggaran perbelanjaan perguruan tinggi tersebut sehingga perguruan tinggi dapat menghitung estimasi pengeluaran untuk satu periode/kurun waktu tertentu. Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan proses pendidikan dalam pengelolaan dananya berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik sesuai dengan bunyi pasal 48 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembiayaan pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain yaitu sisi anggran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan tridarma perguruan tinggi, Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh perguruan tinggi dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Belanja perguruan tinggi sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah porsinya bervariasi diantara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain.

Berdasarkan pendekatan unsur pembiayaan perguruan tinggi dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran yaitu, (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan pembelajaran, (2). Pembiayaan untuk tata usaha,, (3),Pembiayaan untuk saran dan prasaran, (4), Pembiayaan untuk pengembangan kurikulum, (5) Pembiayaan penelitian (6) Pembiayaan ksesjahteraan pegawai (7) Pembiayaan administrasi

Pembiayaan baik perguruan tinggi meliputi pembiayaan langsung dan pembiayaan taklangsung pembiayaan langsung , pembiayaan langsung terdiri dari biaya – biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan – kegiatan perkuliahan berupa pembelian alat – alat pembelajaran sarana belajar, biaya transportasi, gaji dosen, pembiayaan penelitian. Sedangkan biaya tak langsung dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikoordinasikan mahasiswa selama belajar

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung program pengembangan Jurusan/Departemen disusun berdasarkan eligible cost component. Semua komponen pembiayaan yang diajukan harus terkait secara logis dengan program pengembangan yang diusulkan. Biaya yang diusulkan harus sudah memperhitungkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk program pengembangan Jurusan komponen pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam SP4 adalah sebagai berikut::

1. Pengembangan staf. Komponen biaya ini dapat digunakan untuk program non-gelar (pelatihan atau magang) dalam negeri yang terkait dengan peningkatan kemampuan staf, teknisi maupun pegawai administrasi dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar, memperbaiki pengelolaan pendidikan, memperbaiki kualitas layanan baik administrasi maupun laboratorium. Pendidikan tidak bergelar hendaknya tidak dilakukan di dalam institusi sendiri (*in-breeding*), kecuali ada justifikasi yang kuat dan jelas. Anggaran maksimum untuk pengembangan staf adalah 20% dari pagu anggaran SP4 kompetisi.
2. Peralatan. Komponen biaya ini diutamakan untuk memperbaiki peralatan yang ada dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaannya. Dengan justifikasi yang jelas, komponen ini dapat digunakan untuk pembelian alat baru. Anggaran maksimum adalah 40% dari pagu anggaran;
3. Renovasi Bangunan Komponen biaya ini dapat digunakan untuk perbaikan ringan, tanpa menambah volume ruangan, terhadap ruangan yang secara langsung menunjang pelaksanaan

program yang diusulkan, misalnya ruangan kelas, laboratorium, ruang baca dll. Anggaran maksimum untuk renovasi bangunan adalah 15% dari pagu anggaran;

4. Furnitur Komponen biaya ini dapat digunakan untuk melengkapi sarana yang secara langsung menunjang program yang diusulkan, misalnya sarana kelas dan laboratorium. Komponen biaya ini tidak dapat digunakan untuk melengkapi sarana bagi staf pengajar. Anggaran maksimum untuk furniture adalah 10% dari pagu anggaran SP4 kompetisi.
5. Tenaga ahli. Komponen ini dapat digunakan untuk mendatangkan tenaga ahli domestik dan berasal dari luar institusi yang secara khusus ditugaskan untuk memberikan bimbingan dalam suatu bidang kegiatan tertentu, antara lain: metodologi pembelajaran, sistem manajemen internal, pengelolaan laboratorium, dan kegiatan lainnya yang secara langsung menunjang proses belajar mengajar di Jurusan/Departemen. Maksimum dana yang dialokasikan adalah 10% dari pagu anggaran SP4 kompetisi;
6. Bahan ajar. Komponen pendanaan ini digunakan untuk pembelian buku dan bahan pustaka lain yang secara langsung mendukung proses pembelajaran. Komponen biaya ini tidak dapat digunakan untuk menyusun bahan ajar atau diktat;
7. Pengembangan Program. Untuk pengembangan Jurusan/Departemen, komponen biaya ini dapat digunakan untuk pelaksanaan *tracer study*, pengembangan sistem jaminan mutu layanan akademik (termasuk sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran), pengembangan prosedur baku operasional (SOP) manajemen laboratorium, pengembangan sistem administrasi akademik, pengembangan pangkalan data, pelaksanaan evaluasi diri, penyusunan rencana strategis pengembangan Jurusan/Departemen,. Alokasi dana maksimum adalah 20% dari pagu anggaran SP4 kompetisi. Setiap kegiatan yang diusulkan harus disertai *Term of Reference* (Kerangka Acuan);
8. Hibah pengajaran Komponen biaya ini dapat digunakan untuk memperbaiki metode pembelajaran, termasuk penyediaan bahan ajar secara utuh dan pengembangan *delivery*

*system* dan evaluasinya. Hibah dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester (di luar proses seleksi). Satuan biaya kegiatan ini adalah Rp. 5.000.000 per hibah. Jumlah hibah yang dapat diusulkan oleh setiap Jurusan/Departemen adalah maksimum 25% dari total staf permanen, akan tetapi alokasi anggaran tidak melebihi 10% dari pagu anggaran SP4.

9. Manajemen Program. Komponen ini ditujukan untuk mendukung penanganan dan administrasi pelaksanaan program, termasuk diantaranya adalah honor untuk pengurus inti pelaksana program dan bahan habis pakai, komunikasi dan perjalanan yang terkait dengan pelaksanaan program. Komponen ini adalah sebesar 7% dari total usulan anggaran yang bersumber dari SP4 kompetisi. Kebutuhan dana untuk manajemen program dipenuhi dari dana pendamping.

Hal penting dari kondisi biaya pendidikan tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari mahasiswa dalam membayar dana pendidikan. Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan (Berlo, 1961).



Partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan akan tercipta dan meningkat dengan baik apabila mahasiswa memiliki keyakinan bahwa dana pendidikan yang diberikannya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dan hal terpenting adalah keuangan atau dana pendidikan digunakan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan perguruan tinggi terhadap mahasiswanya. Oleh karena itu dalam menjamin kepercayaan mahasiswa terhadap dana pendidikan yang diberikannya, diperlukan manajemen keuangan yang mengatur dan mengelola keuangan atau dana pendidikan yang diberikan oleh mahasiswa.

Upaya dalam mengatur dan mengelola keuangan perguruan tinggi jelas memerlukan manajemen keuangan yang baik, yang mampu merencanakan dan melaksanakan semua program pendidikan yang akan dilaksanakan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu *memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban* (Lipham, 1985; Keith, 1991)

Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan

sekolah; (2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah; dan (3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Manajemen keuangan akan terlaksana dengan baik, apabila diatur dan di tata yang didasarkan pada peraturan yang berlaku. Kebijakan pengelolaan keuangan merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu memberi arahan dan panduan dalam pengaturan keuangan atau dana pendidikan. Kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi merupakan aturan yang mengatur dan mengelola keuangan perguruan tinggi.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Metode yang Digunakan**

Metode penelitian merupakan metode yang berkaitan dengan suatu penyusunan kondisi atau keadaan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan cara menggabungkan kaitan atau relevansi tugas penelitian dengan aspek-aspek ekonomi dalam prosedurnya (Iskandar 2008 : 170). Metode penelitian berkaitan dengan penyusunan kondisi-kondisi untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan cara memadukan kaitan (*relevansi*) tugas penelitian dengan aspek-aspek ekonomi dalam prosedurnya. (Iskandar 2008 : 170) mengatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai : "Cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah bidang administrasi".

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang obyek yang diteliti sesuai tujuannya, dengan asumsi yang digunakan mengacu pada efisiensi biaya dan waktu penelitian tanpa mengesampingkan kadar informasi dan tingkat ketelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif analisis yang ditujukan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat fenomena yang diselidiki (Nazir, 1999 : 63). Sementara itu, Iskandar (2008 : 174) menyatakan bahwa penelitian deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih fenomena dan metode ini seringkali menggunakan teknik survey. Disamping itu pula akan mampu memecahkan masalah dan akhirnya dapat mengungkapkan dimensi-dimensi yang bermanfaat bagi pengembangan rekomendasi

implementasi kebijakan publik.

## **3.2 Operasional Variabel**

### **1. Variabel Penelitian**

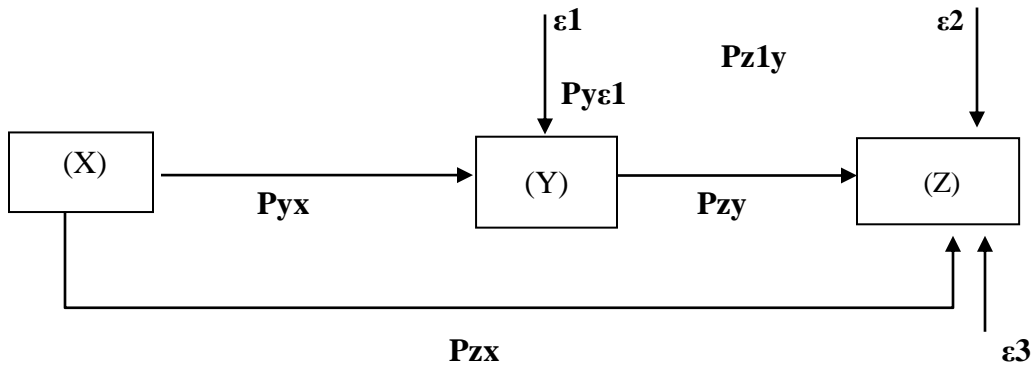
Variabel penelitian sebagai suatu atribut atau aspek dari orang maupun obyek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdiri dari satu buah variabel bebas (*independent*), yaitu Pelaksanaan Kebijakan pengelolaan Keuangan (X) dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

Variabel antara dalam penelitian ini yaitu manajemen keuangan (Y), dengan dimensi perencanaan, pengorganisasian, dan bugdeting. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan (Z), dengan dimensi spontan, terinduksi, tertekan kebiasaan, tertekan sosial ekonomi, dan tertekan peraturan.

### **2. Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian sebagai suatu pandangan atau model atau pola pikir yang dapat menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti, kemudian membuat suatu hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain sehingga mudah dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, perumusan hipotesis yang diajukan, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik analisa yang digunakan serta kesimpulan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, paradigma dari ketiga variabel, didesain dalam model *causal effectual* dan secara skematis dalam model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2  
Paradigma Penelitian

Keterangan

- X = Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta
- Y = Manajemen Keuangan
- Z = Partisipasi Mahasiswa Membayar Dana Pendidikan
- $\epsilon_1$  = Variabel yang tidak diteliti
- $\epsilon_2$  = Variabel yang tidak diteliti
- $P_{zx}$  = Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap Z
- $P_{yx}$  = Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap Y
- $P_{zy}$  = Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel Y terhadap  $Z_1$
- $\epsilon$  = Variabel lain yang tidak diuji

**3. Operasional Variabel**

Operasionalisasi variabel penelitian disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dikumpulkan dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi dan asumsi-asumsi dari variabel penelitian yang ditetapkan. Operasionalisasi variabel penelitian ini meliputi dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang akan mengarahkan tersusunnya instrumen penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta, yaitu suatu kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan khususnya di perguruan tinggi swasta. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu ukuran yang ditunjukkan oleh skor total yang dijawab responden dari item-item pernyataan yang diajukan terhadap variabel kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta (X) yang meliputi dimensi (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.
- b. Manajemen keuangan adalah suatu ukuran yang ditunjukkan oleh skor total yang dijawab responden dari item-item pernyataan yang diajukan terhadap variabel manajemen keuangan (Y) yang meliputi dimensi (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, dan (3) bugdeting.
- c. Partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan adalah suatu ukuran yang ditunjukkan oleh skor total yang dijawab responden dari item-item pernyataan yang diajukan terhadap variabel partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan (Z) yang meliputi dimensi: (1) spontan, (2) terinduksi, (3) tertekan kebiasaan, (4) tertekan sosial ekonomi, dan (5) tertekan peraturan.

Berdasarkan definisi operasional tersebut, operasionalisasi variabel dalam penelitian ini penulis tabulasikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN

No.	VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
1.	Pelaksanaan Kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta (X)	1. Komunikasi	a. Kejelasan informasi b. Ketepatan informasi c. Konsistensi
		2. Sumber Daya	a. SDM b. Sarana dan Prasarana
		3. Disposisi/sikap	a. Memahami kebijakan b. Melaksanakan Kebijakan c. Menerapkan Kebijakan

No.	VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
	(Edward, dalam Iskandar 2005)	4. Struktur dan birokrasi	a. Prosedur b. Fragmentasi c. Pertanggungjawaban
2.	Manajemen keuangan (Y)  (Anoraga, 2004: 114)	1. Perencanaan	a. Penetapan kebutuhan b. Penetapan biaya kuliah c. Rencana Kebutuhan
		2. Penggorganisasian	a. Pembagian tugas b. Struktur c. Pengendalian otoritas d. Koordinasi
		3. Budgeting	a. Menetapkan sumber anggaran b. Alokasi anggaran c. Penggunaan Anggaran d. Eavlusi
3.	Partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan (Z <sub>2</sub> )  Hertifah (2003)	1. Spontan	a. Ketepatan b. Keterpercayaan c. Kesadaran
		2. Terinduksi	a. Adanya bujukan b. Adanya pengaruh dari luar
		3. Tertekan kebiasaan	a. Kebiasaan b. Kekhawatiran tersisih
		4. Tertekan sosial ekonomi	a. Takut kena sanksi b. Takut dikeluarkan
		5. Tertekan peraturan	a. Adanya teguran b. Adanya peringatan

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Populasi Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti atau unit analisis atau merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun obyek/subyek yang di jadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus yayasan, staf pegawai dan mahasiswa angkatan 2018-2020 di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut sebanyak 380 orang.

## 2. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi, atau bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Mengingat jumlah populasi yang sangat besar, maka diambil sampel dengan menggunakan teknik *Stratified random sampling*. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus dari Slovin (dalam Karnaen, 2003) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel
- N = Populasi
- e = Nilai kritis (toleransi) sebesar 10%

Berdasarkan teknik penarikan sampel sebagaimana tersebut maka jumlah sampel yang diambil pada setiap kelompok populasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{380}{1 + (380)(10\%)^2} = 79,17 \approx 80$$

Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 orang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data primer yaitu data yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang bersumber dari jawaban responden.
- b. Data skunder yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang dipublikasikan oleh lembaga maupun non lembaga pemerintah. Data Skunder yaitu dokumen yang diterbitkan



oleh lembaga pemerintah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

- 1) Angket/kuesioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan disertai alternatif jawaban kepada responden. Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mengungkapkan mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan, manajemen keuangan, partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan.
- 2) Wawancara, digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan sebagai data pembanding dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan ketua STIKES Garut dan Kepala Bidang Keuangan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa dalam membayar uang pendidikan, pelaksanaan manajemen keuangan serta implementasi kebijakan yang berhubungan dengan keuangan.
- 3) Observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung objek penelitian berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan mahasiswa dalam membayar uang pendidikan, serta ada tidaknya mahasiswa yang membayar uang pendidikan tidak tepat waktu.

b. Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari baik buku-buku literatur (*logic rational*) maupun dokumen-dokumen resmi seperti peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan (*legal formal*) yang berkaitan dengan kebijakan publik, manajemen keuangan, partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan.

#### **4. Alat Ukur Penelitian serta Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian**

##### **a. Alat Ukur Penelitian**

Salah satu tahapan penting dalam proses penelitian ilmiah adalah menyusun alat ukur penelitian sebagai pedoman untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan berupa kuesioner yang dibuat secara terstruktur, didalamnya meliputi beberapa item pertanyaan yang disertai alternatif jawaban. Dengan demikian maka responden tinggal memilih salah satu jawaban sesuai dengan jawaban sebenarnya.

Kuesioner terstruktur ini dibuat mengingat satuan pengukuran yang digunakan adalah skoring, yaitu pemberian nilai skor pada setiap alternatif jawaban yang disediakan dalam pertanyaan penelitian. Tingkat pengukuran variabel penelitian ini adalah ordinal dan kategori jawaban yang bersifat tertutup terdiri dari 5 (lima) pilihan dengan menggunakan skala perbedaan semantik.

##### **b. Pengujian Validitas Alat Ukur Penelitian**

Pengujian validitas alat ukur penggunaan penelitian dapat menunjukkan sejauhmana alat untuk penelitian mampu mengukur variabel yang terdapat dalam suatu penelitian. Dengan kata lain validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat akurasi suatu alat ukur. Suatu alat ukur yang salah akan mempunyai validitas rendah, begitu pula sebaliknya.

###### **1) Pengujian Validitas Konseptual**

Pengujian validitas konseptual, merupakan pengujian tingkat kesahihan atau akurasi alat ukur dalam mengukur variabel yang akan diteliti yang didasarkan pada konsep atau materi. Pengujian validitas konseptual dilakukan dengan judgement pada dosen ahli atau dosen pembimbing.

###### **2) Pengujian Validitas Lapangan**

Pengujian validitas alat ukur akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan korelasi *Pearson Product Momen* yang meliputi empat tahapan yaitu :

### 1) Penentuan Nilai Korelasi

Untuk menentukan nilai korelasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum X_1 Y_1 - (\sum X_1)(\sum Y_1)}{\sqrt{[n \sum X_1^2 - (\sum X_1)^2][n \sum Y_1^2 - (\sum Y_1)^2]}}$$

r : Koefisien Korelasi

X : Jumlah skor item ke - I

Y : Skor total seluruh item

N : Jumlah responden

### 2) Penentuan uji Signifikansi Korelasi Product Moment (t hitung)

Untuk menentukan uji signifikansi korelasi *Product Moment*, secara statistik angka korelasi yang diperoleh diuji t atau dibandingkan dengan t tabel dengan derajat (db) = n-2 pada  $\alpha = 0,05$  dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

r = adalah koefisien korelasi

n = adalah jumlah responden

### 3) Kaidah Keputusan

Nilai t-hitung yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai t-tabel. Untuk kesalahan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dan derajat kebebasan ( $dk = n-2$ ), setelah dibandingkan kemudian diambil keputusan dengan kaidah sebagai berikut :

- 1) Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka instrumen tersebut valid
- 2) Jika  $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$  maka instrumen tersebut tidak valid.

Dilihat dari kriteria maka pengujian, yaitu bahwa koefisien validitas dianggap signifikan apabila harga t-hitung lebih besar dari t-tabel  $(1-\alpha) (n-2)$  dengan harga parameter  $p \alpha 0,10$ . Alat ukur yang signifikan adalah valid, sedangkan yang tidak signifikan adalah tidak valid atau harus di drop.

#### 4) Kriteria Penafsiran

Secara operasional pengujian validitas alat ukur penelitian akan dilakukan melalui uji coba kuesioner terhadap sejumlah responden (20 orang) yang mewakili 3 kelompok populasi. Secara statistik, jumlah responden sebesar itu sudah memadai untuk menentukan validitas alat ukur penelitian karena diasumsikan akan menghasilkan distribusi skor yang mendekati kurva normal.

Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.2  
**UJI VALIDITAS VARIABEL X**  
*(Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan)*

<b>Nomor Item</b>	<b>Nilai Korelasi (r hitung)</b>	<b>Nilai t hitung</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,577	2,9973	Valid
2	0,566	2,9128	Valid
3	0,491	2,3912	Valid
4	0,693	4,0782	Valid
5	0,737	4,6262	Valid
6	0,630	3,4418	Valid
7	0,527	2,6309	Valid
8	0,458	2,1859	Valid
9	0,744	4,7241	Valid

10	0,729	4,5184	Valid
11	0,279	1,2326	Tidak Valid
12	0,672	3,8499	Valid
13	0,028	0,1188	Tidak Valid
14	0,480	2,3214	Valid
15	0,813	5,9239	Valid
16	0,525	2,6171	Valid
17	0,720	4,4018	Valid
18	0,787	5,4120	Valid
19	0,713	4,3143	Valid
20	0,549	2,7867	Valid

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada dua item pernyataan yang tidak valid berhubungan dengan variable pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan, sehingga kedua pernyataan tersebut tida dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

Tabel 3.3

**UJI VALIDITAS VARIABEL Y**  
(*Manajemen Keuangan*)

<b>Nomor Item</b>	<b>Nilai Korelasi (r hitung)</b>	<b>Nilai t hitung</b>	<b>Keterangan</b>
21	0,559	2,8603	Valid
22	0,717	4,3639	Valid
23	0,449	2,1319	Valid
24	0,568	2,9280	Valid
25	0,802	5,6964	Valid
26	0,809	5,8391	Valid
27	0,534	2,6796	Valid
28	0,623	3,3790	Valid
29	0,862	7,2146	Valid
30	0,780	5,2882	Valid
31	0,633	3,4691	Valid
32	0,904	8,9709	Valid
33	0,576	2,989494	Valid

34	0,686	4,000062	Valid
35	0,714	4,326593	Valid
36	0,854	6,964065	Valid
37	0,819	6,055702	Valid
38	0,759	4,9458	Valid
39	0,768	5,087593	Valid
40	0,548	2,779471	Valid
41	0,623	3,379048	Valid
42	0,862	7,214631	Valid
43	0,780	5,28822	Valid
44	0,345	1,559458	Tidak Valid
45	0,686	4,000062	Valid

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada variabel manajemen keuangan terdapat satu pernyataan yang tidak valid, sehingga tidak digunakan dalam instrument penelitian.

Tabel 3.4

**UJI VALIDITAS VARIABEL Z**  
(Partisipasi Mahasiswa)

<b>Nomor Item</b>	<b>Nilai Korelasi (r hitung)</b>	<b>Nilai t hitung</b>	<b>Keterangan</b>
46	0,714	4,3266	Valid
47	0,753	4,8550	Valid
48	0,577	2,9973	Valid
49	0,668	3,8084	Valid
50	0,329	1,4781	Tidak Valid
51	0,836	6,4637	Valid
52	0,707	4,2414	Valid
53	0,594	3,1327	Valid
54	0,674	3,8709	Valid
55	0,653	3,6580	Valid
56	0,723	4,4401	Valid
57	0,620	3,3526	Valid
58	0,764	5,0237	Valid
59	0,718	4,3765	Valid
60	0,652	3,6483	Valid

61	0,780	5,2882	Valid
62	0,695	4,1010	Valid
63	0,684	3,9781	Valid
64	0,340	1,5339	Tidak Valid
65	0,709	4,2654	Valid
66	0,784	5,3583	Valid
67	0,76	4,9612	Valid
68	0,75	4,8107	Valid
69	0,663	3,7574	Valid
70	0,604	3,2153	Valid

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada dua item pernyataan yang tidak valid, sehingga tidak dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

### c. Pengujian Reliabilitas Alat Ukur Penelitian

Selain harus valid, alat ukur penelitian juga harus reliabel (handal). Suatu alat ukur dikatakan handal apabila alat ukur penelitian memberikan hasil yang tetap terhadap variabel yang diukur, walaupun berubah. Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat penelitian dapat dipercaya atau dihandalkan. Hal ini dapat dilihat, apabila suatu alat ukur diukur berulang kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif konstan, maka alat ukur penelitian tersebut reliabel atau handal.

Untuk menguji reliabilitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi secara keseluruhan dengan menggunakan *korelasi Product Moment* menurut Pearson (dalam Dajan, 1986 : 376). Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut ;

$$r = \frac{n \sum X_1 Y_1 - (\sum X_1)(\sum Y_1)}{\sqrt{[n \sum X_1^2 - (\sum X_1)^2][n \sum Y_1^2 - (\sum Y_1)^2]}}$$

Keterangan :

r = koefisien korelasi

$\Sigma x$  = jumlah skor ganjil

$\Sigma y$  = jumlah skor genap

n = jumlah responden

Kemudian untuk mencari koefisien reliabilitasnya digunakan rumus *Alfa Cronbach*

Sebagai berikut :

$$r = \left\{ \frac{k}{k-1} \right\} \left\{ 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_1^2} \right\}$$

Keterangan :

r = Reliabilitas alat ukur

k = banyaknya butir pertanyaan

$\sum S_i^2$  = jumlah varian butir / item

$S_1^2$  = varian nilai total

Selanjutnya dilakukan penghitungan nilai statistiknya dengan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = nilai hitung

r = koefisien korelasi hasil hitung

n = jumlah responden

Untuk menarik keputusan maka digunakan acuan sebagai berikut:

Bila  $t_{hitung} > t(1/2 \alpha, n-2)$  alat ukur reliabel

Bila  $t_{hitung} < t(1/2 \alpha, n-2)$  alat ukur tidak reliabel

Hasil pengujian reliabilitas instrumen, disajikan pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**UJI RELIABILITAS VARIABEL X**  
(Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan)



**(RUMUS ALFA CRONBACH)**

<b>Nomor Item</b>	$\Sigma X_i$	$[\Sigma X_i]^2$	<b>Rumus-rumus Hitung Reliabilitas</b>	
1	84	7056	$S_i^2 = \frac{JK_i}{N} - \frac{JK_s}{N^2} = 6,04$ $S_i^2 = \frac{\Sigma X_i^2}{N} - \frac{[\Sigma X_i]^2}{N^2} = 43,46$ $r = \left[ \frac{K}{K-1} \right] \left[ 1 - \frac{S_i^2}{S_i^2} \right] = 0,906$ $t = \frac{r\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}$	
2	83	6889		
3	91	8281		
4	87	7569		
5	88	7744		
6	76	5776		
7	84	7056		
8	81	6561		
9	79	6241		
10	76	5776		
11	81	6561		
12	81	6561		
13	78	6084		
14	83	6889		
15	81	6561		
16	85	7225		
17	80	6400		
18	77	5929		
19	84	7056		
20	77	5929		
			$t_{\text{tabel}}, \alpha = 0,05$ dan $dk = 20 - 2 = 18$ diperoleh = 2,101	
<b>Keterangan</b>			<b>Kaidah Keputusan :</b>	
K	20	JKs	134144	Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} \rightarrow$ reliabel
$\Sigma X_i$	1636	$\Sigma X_i^2$	134694	Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}} \rightarrow$ tidak reliabel
$\frac{[\Sigma X_i]^2}{2}$	2676496	Jki	6828	<b>KESIMPULAN : RELIABEL</b>
N	20	$N^2$	400	

**UJI RELIABILITAS VARIABEL Y**  
(Manajemen Keuangan)

**(RUMUS ALFA)**

Nomor Item	$\Sigma X_i$	$[\Sigma X_i]^2$	Rumus-rumus Hitung Reliabilitas	
21	90	8100	$S_i^2 = \frac{JK_i}{N} - \frac{JK_s}{N^2} = 11,075$	
22	92	8464		
23	90	8100		
24	85	7225	$S_i^2 = \frac{\Sigma X_i^2}{N} - \frac{[\Sigma X_i]^2}{N^2} = 131,80$	
25	78	6084		
26	84	7056		
27	81	6561	$r = \left[ \frac{K}{K-1} \right] \left[ 1 - \frac{S_i^2}{S_i'^2} \right] = 0,964$	
28	84	7056		
29	80	6400		
30	83	6889	$t = \frac{r\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}} = 15,422$	
31	83	6889		
32	90	8100		
33	89	7921	<p><math>t_{\text{tabel}}, \alpha = 0,05</math> dan <math>dk = 20 - 2 = 18</math> diperoleh = 2,101</p> <p>Kaidah Keputusan :</p> <p>Jika <math>t_{\text{hitung}} &gt; t_{\text{tabel}} \longrightarrow</math> reliabel</p> <p>Jika <math>t_{\text{hitung}} &lt; t_{\text{tabel}} \longrightarrow</math> tidak reliabel</p> <p><b>KESIMPULAN : RELIABEL</b></p>	
34	85	7225		
35	81	6561		
36	75	5625		
37	77	5929		
38	83	6889		
39	83	6889		
40	86	7396		
41	84	7056		
42	80	6400		
43	83	6889		
44	89	7921		
45	85	7225		
Keterangan				
K	25	JKs		176850
$\Sigma X_i$	2100	$\Sigma X_i^2$		223136
$[\Sigma X_i]^2$	4410000	Jki		9064
N	20	$N^2$		400

**UJI RELIABILITAS VARIABEL Z**  
(Partisipasi Mahasiswa)

**(RUMUS ALFA)**

Nomor Item	$\Sigma X_i$	$[\Sigma X_i]^2$	Rumus-rumus Hitung Reliabilitas
46	83	6889	$S_i^2 = \frac{JK_i}{N} - \frac{JK_s}{N^2} =$ 6,85
47	84	7056	
48	91	8281	
49	86	7396	$S_i^2 = \frac{\Sigma X_i^2}{N} - \frac{[\Sigma X_i]^2}{N^2} =$ 63,56
50	88	7744	
51	85	7225	
52	86	7396	$r = \left[ \frac{K}{K-1} \right] \left[ 1 - \frac{S_i^2}{S_t^2} \right] =$ 0,939
53	85	7225	
54	86	7396	
55	87	7569	$t = \frac{r\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}$ 11.612
56	83	6889	
57	88	7744	
58	86	7396	
59	87	7569	
60	87	7569	
61	83	6889	
62	86	7396	
63	73	5329	
64	79	6241	
65	84	7056	
66	87	7569	
67	88	7744	
68	86	7396	
69	83	6889	
70	83	6889	
			$t_{\text{tabel}}, \alpha = 0,05$ dan $dk = 20 - 2 = 18$ diperoleh = 1,734
Keterangan			Kaidah Keputusan :
K	25	JKs	180742
$\Sigma X_i$	2124	$\Sigma X_i^2$	226840
$[\Sigma X_i]^2$	4511376	Jki	9174
N	20	$N^2$	400
			Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} \rightarrow$ reliabel Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}} \rightarrow$ tidak reliabel
			<b>KESIMPULAN : RELIABEL</b>

**3.4 Teknik Pengolahan Data**

## **1. Kegiatan Pengolahan Data**

Kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu proses editing, coding, dan tabulating.

- a. Proses editing adalah pemeriksaan/penyuntingan data berupa kuesioner penelitian yang telah terkumpul dari responden, sehingga data yang terhimpun memenuhi harapan peneliti.
- b. Proses coding adalah pemberian identitas dengan cara memberikan kode-kode pada kategori jawaban responden dalam kuesioner penelitian, sehingga memiliki arti tertentu pada saat data dianalisis.
- c. Proses tabulating adalah pembeberan dengan cara membuat tabel-tabel pengolahan data kedalam tabel skor total yang bermaksud memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya.

## **2. Transformasi Data**

Salah satu bentuk manipulasi data mentah penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu mentransformasikan data yang bersifat ordinal menjadi data interval melalui metode suksesif interval. Hal ini perlu dilakukan mengingat dalam proses analisis lanjutan perlu dipahami mengenai skala pengukuran minimal interval.

Langkah-langkah transformasi data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan setiap item pertanyaan.
2. Dalam setiap item pertanyaan ditentukan beberapa frekuensi jawaban yang mendapat skor 1, 2, 3, 4 dan 5.
3. Menentukan proporsi kumulatif
4. Menghitung nilai  $Z$  untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan tabel normal.

5. Menentukan nilai interval (*scale value*) untuk setiap nilai Z dengan menggunakan *f* sebagai berikut :

$$SV \text{ (Scale Value)} = \frac{(\text{Denisty at lower limit}) (\text{Denisty at upper Limit})}{(\text{Area Under Upper Limit}) - (\text{Area Under Lower Limit})}$$

6. *Scale Value* terkecil (harga negative terbesar) diubah menjadi sama dengan (1). Penentuan nilai data transformasi dengan menggunakan rumus :

$$SV_{\text{transformasi}} = SV - SV_{\text{minimum}} + 1$$

### 3. Pengujian Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Berkenaan dengan hal tersebut, maka tingkat pengukuran variabel yang bersifat ordinal tingkat urutan diubah menjadi interval jarak/selang-selang melalui metode susesif. Analisis data dilakukan dengan dua cara yaitu secara deskriptif dan statistik. Teknik deskriptif menurut Iskandar (2008:174) digunakan untuk memperoleh gambaran tentang gejala-gejala yang diteliti dalam keadaan sekarang.

Kemudian untuk mendeskripsikan data secara kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis kategori atau ukuran nilai dari skor rata-rata jawaban responden pada tiap variabel penelitian, yang didasarkan pada perbandingan distribusi skor data yang diperoleh dengan skor yang seharusnya dicapai dan diklasifikasikan dalam skala interval.

Teknis analisis data berguna untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah diidentifikasi dengan menguji hipotesis yang diajukan. kemudian dibahas secara mendalam untuk menggambarkan fenomena atas kasus yang dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah hipotesis yang diajukan maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik jalur (*path analysis*) dengan urutan sebagai berikut :

1. Menghitung matrik korelasi antara variabel

$$R = \begin{bmatrix} r_{XX} & r_{YX} & r_{ZX} \\ & r_{YY} & r_{YZ} \\ & & r_{ZZ} \end{bmatrix}$$

$$\text{Dimana : } r_{yx} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[(\sum X^2) - (\sum X)^2][(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

$$r_{yx} = \frac{n \sum YZ - (\sum Y)(\sum Z)}{\sqrt{[(\sum Y^2) - (\sum Y)^2][(\sum Z^2) - (\sum Z)^2]}}$$

$$r_{yx} = \frac{n \sum XZ - (\sum X)(\sum Z)}{\sqrt{[(\sum X^2) - (\sum X)^2][(\sum Z^2) - (\sum Z)^2]}}$$

2. Menguji Koefisien Jalur  $P_{yx}$

Statistik Uji :

$$t = \frac{P_{YX}}{\sqrt{\frac{1 - P_{YX}^2}{n - 2}}} \text{ dimana } P_{YX} = r_{YX}$$

Hipotesis statistik :

$H_0 : P_{YX} \leq 0$  artinya Pengaruh variabel X terhadap Y tidak signifikan

$H_1 : P_{YX} \geq 0$  artinya Pengaruh variabel X terhadap Y signifikan

Kriteria Uji :

Tolak  $H_0$  apabila  $t > t_{(1-\alpha)(n-2)}$

3. Membuat invers Matrik Korelasi ( $R^{-1}$ )

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} C_{XX} & C_{YX} & C_{ZX} \\ & C_{YY} & C_{YZ} \\ & & C_{ZZ} \end{bmatrix}$$

#### 4. Menghitung Besar Pengaruh

$$P_{ZX} = -\frac{C_{ZX}}{C_{ZZ}}$$

$$P_{ZY} = -\frac{C_{ZY}}{C_{ZZ}}$$

$$R^2_{ZXY} = P_{ZX} \cdot r_{ZX} + P_{ZY} \cdot r_{ZY}$$

Menguji hipotesis keberartian koefisien jalur

$$H_0 : P_{ZX} \leq 0 \text{ melawan } H_1 : P_{ZX} > 0$$

$$H_0 : P_{ZY} \leq 0 \text{ melawan } H_1 : P_{ZY} > 0$$

Statistik Uji

$$t_x = \frac{P_{ZX}}{\sqrt{\frac{1 - R^2_{ZYX}}{(n - k - 1)(1 - R^2_{YX})}}}$$

$$t_y = \frac{P_{ZY}}{\sqrt{\frac{1 - R^2_{ZYX}}{(n - k - 1)(1 - R^2_{ZY})}}}$$

Kriteria Uji :

Tolak  $H_0$  apabila  $t = t_{(1-\alpha)(n-k-1)}$  artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

#### 5. Menentukan besar pengaruh variabel lain :

$$P^2_{Y \epsilon 1} = \sqrt{1 - R^2_{YX}}$$

$$P^2_{Y \epsilon 2} = \sqrt{1 - R^2_{ZYX}}$$

6. Menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung

- a. Pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z

$$P_{ZX} = r_{ZX} \cdot r_{ZX}$$

- a. Pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z

$$P_{ZXY} = P_{ZX} \cdot r_{YX} \cdot P_{ZY}$$

- b. Jumlah Pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z

$$Z = P_{ZX} + P_{ZXY}$$

- c. Pengaruh langsung variabel Y terhadap variabel Z

$$P_{ZY} = r_{ZY} \cdot r_{ZY}$$

### 3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Memudahkan bagi penulis untuk memperoleh data dari responden/ informan.
- b. Hasil penelitian ini akan bermnafaat untuk STIKES Karsa Husada Garut tempat penulis bekerja sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan di tempat tersebut terutama yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas laporan keuangan dan partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan

Waktu penelitian akan dilakukan selama 9 bulan mulai bulan Maret sampai Oktober 2012. Dengan rincian langkah-langkah jadwal penelitian sebagai berikut:



Tabel 1.4  
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2021 ( Dalam Bulan )							
		April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
1.	Pemilihan Masalah								
2.	Studi Literatur								
3.	Menyusun Proposal								
4.	Seminar Usulan penelitian								
5.	Uji Validitas dan Reliabilitas								
6.	Proses Pengumpulan Data								
7	Pengolahan dan Analisis Data								
8	Penyusunan Laporan								
9	Ujian Sidang								
10	Perbaikan Tesis								

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Kondisi Objektif STIKes Karsa Husada Garut**

STIKes Karsa Husada Kabupaten Garut beralamat di Jl. Subyadinata N0. 7 Garut, kode pos 44151. Dalam sejarah pendiriannya STIKes Karsa Husada Garut merupakan konversi dari perguruan tinggi Akademi Keperawatan (Akper) Karsa Husada Garut yang telah berdiri sejak tahun 1994. Proses konversi ini telah mendapatkan izin operasional dari Mendiknas RI melalui SK Mendiknas No: 129/D/O/2007 dan mendapatkan rekomendasi dari Menkes RI melalui Rekomendasi Menkes RI No: HK.00.062.2.2.00234.

##### **1. Visi STIKes Karsa Husada Garut**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karsa Husada Garut menjadi Lembaga Pendidikan yang Terunggul dan Bermutu Dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Serta Mampu Bersaing Di Tingkat Regional, Nasional, Internasional Pada Tahun 2017 dalam naungan ridho Allah, SWT.

##### **2. Misi STIKes Karsa Husada Garut**

- a. Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Yang Berorientasi Pada Kebutuhan Masyarakat Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi Bidang Kesehatan
- b. Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif, Inovatif, dinamis dan agamis
- c. Menyelenggarakan Penelitian Yang Dapat Meningkatkan Keunggulan Di Bidang Pengetahuan Dan Teknologi Kesehatan

- d. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan
- e. Mengembangkan Kemitraan Dengan Berbagai Institusi Pengguna Baik Regional, Nasional Maupun Internasional
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis dalam suasana kekeluargaan

### **3. Tujuan STIKes Karsa Husada Garut**

- a. Terciptanya Kurikulum Pendidikan Berbasis Kopetensi Untuk seluruh Program Studi
- b. Terciptanya Iklim Pembelajaran Yang Kondusif, Kreatif Dan Inovatif
- c. Terciptanya Penelitian Dosen Yang Berdampak Pada Pengembangan Pengetahuan dan Teknologi Bidang Kesehatan
- d. Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan
- e. Terjalin Kerja Sama Kemitraan Dengan Berbagai Institusi Pengguna Baik Regional, Nasional maupun Internasional dalam Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi
- f. Terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis dalam suasana kekeluargaan.

Pada saat ini STIKes Karsa Husada Garut telah memiliki 3 Program Studi yaitu Program

Studi D-III Keperawatan, Program Studi D-III Kebidanan dan Program Studi S1 Keperawatan.

#### **1. D-III Keperawatan**

##### **Identitas Program Studi D-III Keperawatan**

- a. Nama Pimpinan PTS : Engkus Kusnadi, S.Kep.,M.Kes
- b. Nama Program Studi : D-III Keperawatan
- c. Kode Program Studi : 14-401
- d. Nama Ketua Program Studi : Sri Yekti Widadi, S.Kep

- e. Jenjang Pendidikan : S-1
- f. Nomor & Tanggal SK Dirjen Dikti : 3104/D/T/K-IV/2009
- g. Tanggal & Tahun berakhirnya Ijin PS : 10 Agustus 2012
- h. Nomor & tanggal SK Akreditasi BAN PT: 002/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/V/2010 Tanggal 14 Mei 2010.

### **Jumlah Dosen dan Mahasiswa Program Studi D-III Keperawatan**

Program Studi DIII Keperawatan memiliki jumlah tenaga dosen tetap sebanyak 13 orang. Dengan jumlah total mahasiswa pada tahun akademik 2009/2010 adalah sebanyak 331 orang.

### **Visi Program Studi D-III Keperawatan**

Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan unggul dalam bidang keperawatan medical bedah berbasis komunitas di tahun 2015.

### **Misi Program Studi D-III Keperawatan**

- a. Mendidik mahasiswa profesional keperawatan yang memiliki integritas.
- b. Mengembangkan institusi dengan tata kelola organisasi terbaik yang menjadi Katalisator dan Inspirator bagi pengembangan kesehatan masyarakat
- c. Meningkatkan hububungan dengan Stakeholder dalam pengembangan institusi yang berkelanjutan
- d. Meningkatkan Employe Value dengan budaya kerja yang inspiring dan prestatif

## **2. D-III Kebidanan**

### **Identitas Program Studi D-III Kebidanan**

- a. Nama Pimpinan PTS : Engkus Kusnadi, S.Kep.,M.Kes
- b. Nama Program Studi : D-III Kebidanan
- c. Kode Program Studi : 15-401
- d. Nama Ketua Program Studi : Hj. Rahmi Nurassiyah, S.ST
- e. Jenjang Pendidikan : D-III
- f. Nomor & Tanggal SK Dirjen Dikti : 3015/D/T/K-IV/2010
- g. Tanggal & Tahun berakhirnya Ijin PS : 14 Juli 2013

### **Jumlah Dosen dan Mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan**

Program STudi D-III Kebidanan memiliki jumlah tenaga dosen tetap sebanyak 16 orang. Dengan jumlah total mahasiswa pada tahun akademik 2009/2010 adalah sebanyak 260 orang.

### **Visi Program Studi D-III Kebidanan**

Mewujudkan proGram studi DIII Kebidanan yang bermutu dan Unggul dalam Pelayanan Kebidanan Komprehensif dikomunitas Tahun 2015

### **Misi Program Studi D-III Kebidanan**

- a. Mengembangkan kurikulum Pendidikan DIII Kebidanan sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Melaksanakan penelitian di bidang Kebidanan, serta bidang lain yang menunjang.
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kebidanan serta bidang lain yang menunjang.
- d. Menciptakan proses perkuliahan dan iklim kerja yang kondusif dan inovatif.
- e. Menjalin kemitraan dengan institusi lain

### **3. S1 Keperawatan**

#### **Identitas Program Studi S1 Keperawatan**

- a. Nama Pimpinan PTS : Engkus Kusnadi, S.Kep.,M.Kes
- b. Nama Program Studi : S1 Keperawatan
- c. Kode Program Studi : 14-201
- d. Nama Ketua Program Studi : Sri Wulan Megawati, S.Kep.Ns
- e. Jenjang Pendidikan : S1
- f. Nomor & Tanggal SK Dirjen Dikti : 3103/D/T/K-IV/2009
- g. Tanggal & Tahun berakhirnya Ijin PS : 10 Agustus 2013

#### **Jumlah Dosen dan Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan**

Program STudiS1 KeKebidanan memiliki jumlah tenaga dosen tetap sebanyak 12 orang dan 1orang dosen DPK. Dengan jumlah total mahasiswa pada tahun akademik 2009/2010 adalah sebanyak 235 orang.

#### **Visi Program Studi S1 Keperawatan**

menjadikan program studi s1 keperawatan sebagai program studi berkualitas dalam penyelenggaraan pendidikan bidang keperawatan profesional yang kompetitif secara regional maupun nasional dengan unggulan bidang keperawatan medikal bedah pada tahun 2015.

#### **Misi Program STudi S1 Keperawatan**

- a. Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mengembangkan proses belajar yang kreatif, dinamis dan inovatif.

- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang terhadap proses belajar mengajar.
- d. Menjalani kerja sama antar sektor maupun lintas sektor untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- e. Melaksanakan penelitian keperawatan yang dapat mendukung terhadap pengembangan asuhan keperawatan.
- f. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang kesehatan

#### **4.1.2 Permasalahan Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 pasal 31 “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahal biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya klausul tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah belum punya kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut dicicil dengan komitmen peningkatan alokasi tiap tahunnya. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas SDM. Disisi lain, prioritas alokasi pembiayaan pendidikan seyogianya diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam hal aksesibilitas dan daya tampung. Karena

itu, dalam mengukur efektifitas pembiayaan pendidikan, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terarah penggunaannya.

Menurut Adam Smith, Human Capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui Pendidikan, belajar sendiri, belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Perolehan ketrampilan dan kemampuan akan menghasilkan tingkat balik Rate of Return yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Berdasarkan pendekatan Human Kapital ada hubungan Lenier antara Investment Pendidikan dengan Higher Productivity dan Higher Earning. Manusia sebagai modal dasar yang di Infestasikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif dan meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut, dengan demikian manusia yang memperoleh penghasilan lebih besar dia akan membayar pajak dalam jumlah yang besar dengan demikian dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan negara.

Peningkatan ketrampilan yang dapat menghasilkan tenaga kerja yang Produktivitasnya tinggi dapat dilakukan melalui Pendidikan yang dalam pembiayaannya menggunakan efesiensi Internal dan Eksternal. Dalam upaya mengembangkan suatu sistem pendidikan nasional yang berporos pada pemerataan, relevansi, mutu, efesiensi, dan efektivitas dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan kita, namun dalam kenyataannya perlu direnungkan, dikaji, dibahas, baik dari segi pemikira tioritis maupun pengamatan emperik.

Untuk dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satunya hal paling penting adalah mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Administrasi pembiayaan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyaluran anggaran perlu dilakukan secara strategis dan intergratif antara stakeholder agar mewujutkan kondisi ini, perlu dibangun rasa saling percaya, baik internal pemerintah maupun



antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata- kata kunci untuk mewujudkan efektifitas pembiayaan pendidikan.

Dalam meningkatkan mutu lulusan diperlukan dukungan yang kuat dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan. Dari sekian banyaknya kriteria untuk meningkatkan mutu lulusan tidak terlepas dari penggunaan uang dalam terselenggaranya proses pendidikan. Sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang.

Menurut Abubakar dan Taufani (2008:255) uang dapat dipandang ibarat darah dalam tubuh manusia yang mati hidupnya ditentukan oleh sirkulasi darah dalam tubuhnya. Uang termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar dapat membantu pencapaian tujuan pendidikan.

Pendanaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP No 48 tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dibagi menjadi :

1. Biaya Satuan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
2. Biaya Penyelenggaraan dan/ atau Pengelolaan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemprov, pemko/ pemkab, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/ Yayasan.

3. Biaya Pribadi Peserta Didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

PP No. 48 tahun 2008, secara jelas menyatakan bahwa tanggung jawab penganggaran dan sekaligus pembiayaan pendidikan tertumpu pada tiga komponen penting, yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Kaitannya dengan perguruan tinggi swasta seperti halnya STIKes Kabupaten Garut keberadaan keuangan atau dana pendidikan secara konseptual ditekankan pada masyarakat atau mahasiswa. Oleh karena itu partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan merupakan harapan utama dalam menjaga keberlangsungan proses pendidikan.

Fenomena terjadi di tataran mahasiswa adalah tidak semua mahasiswa siap dengan keuangan atau dana pendidikan. Ada sebagian mahasiswa yang memiliki orang tua dengan status ekonomi yang kurang sehingga tidak selamanya siap dalam membayar dana pendidikan. Di samping itu seringkali pula ada mahasiswa yang kurang perhatian terhadap dana pendidikan sehingga melalikannya. Kondisi inilah yang menjadi fenomena di tataran perguruan tinggi swasta.

Menyikapi fenomena adanya mahasiswa yang kurang perhatian terhadap keuangan atau biaya pendidikan, maka seringkali lembaga pendidikan memiliki strategi-startegi tertentu. Hal yang paling nampak adalah adanya penekanan biaya pendidikan harus lunas pada saat menghadapi ujian. Kondisi ini merupakan upaya agar mahasiswa teringat akan tanggung jawabnya dalam membayar dana pendidikan. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memberikan teguran baik langsung maupun tidak langsung bagi mahasiswa yang sudah telah dan sering menunggak keuangan atau dana pendidikannya.

## 4.2 Karakteristik Responden

Sesuai dengan substansi permasalahan pokok penelitian, maka responden yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus yayasan, staf pegawai dan mahasiswa angkatan 2018-2020 di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut sebanyak 80 orang.

Adapun karakteristik responden yang diukur adalah kelompok umur, jenis kelamin, dan pekerjaan responden. Secara umum karakteristik responden dari aspek-aspek tersebut cukup bervariasi. Data selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 4.1  
Keadaan Responden Berdasarkan Umur

<b>No</b>	<b><i>Golongan Kelompok Umur</i></b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
1.	> 20	4	5,00
2.	21 – 25	36	45,00
3.	26 – 30	26	32,50
4.	31 – 35	9	11,25
5.	36 >	5	6,50
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa modus usia responden ada pada interval usia 21-25 tahun yaitu sebesar 45,00% dari keseluruhan responden. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata responden berada dalam usia yang cukup matang dan mempunyai idealitas serta memiliki sifat yang kritis dalam menyikapi permasalahan yang

diteliti, sehingga diasumsikan bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai tingkat akurasi yang baik.

**Tabel 4.2**

**Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Laki-laki	37	46,25
2	Perempuan	43	53,75
	Jumlah	80	100

Sumber: Penelitian 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin responden secara umum didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 53,75% dari keseluruhan responden. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata responden mempunyai jenis kelamin perempuan, di sisi lain biasanya perempuan memiliki tingkat ketelitian dan kedewasaan yang lebih matang, sehingga penelitian yang dilakukan diasumsikan mempunyai tingkat akurasi yang baik.

**Tabel 4.3**

**Keadaan Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No	Golongan	Jumlah	%
1	PNS	7	8,75
2	Honorar	15	18,75
3	Mahasiswa	58	72,50
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa modus pekerjaan responden sebagian besar merupakan mahasiswa murni sebanyak 72,50%, sementara sisanya ada yang sudah bekerja namun masih sebagai tenaga honorer maupun yang sudah menjadi PNS. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata responden mempunyai status intelektual yang cukup baik dan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap permasalahan yang diteliti.

#### 4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui kondisi variabel Pelaksanaan Kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan, Manajemen Keuangan dan Partisipasi Mahasiswa membayar Dana Pendidikan maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari X, Y dan Z pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Dari jawaban tersebut, kemudian disusun kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap item pertanyaan yang merupakan jawaban dari 80 responden.
2. Persentase adalah nilai kumulatif item dibagi dengan nilai frekuensinya dikalikan dengan 100 %
3. Jumlah responden = 80 orang, dan nilai skala pengukuran terbesar = 5, sedangkan skala pengukuran terkecil = 1, sehingga diperoleh jumlah kumulatif nilai terbesar =  $80 \times 5 = 400$ , dan jumlah kumulatif nilai terkecil =  $80 \times 1 = 80$ . Adapun nilai persentase terbesar adalah  $= (400/400) \times 100 \% = 100 \%$  dan nilai persentase terkecil =  $(80/400) \times 100 \% = 20 \%$ , dari kedua nilai persentase tersebut diperoleh nilai rentang =  $100\% - 20\% = 80 \%$  dan jika dibagi dengan 5 skala pengukuran didapat nilai interval persentase sebesar  $= (80\%) / 5 = 16 \%$  sehingga diperoleh klasifikasi kriteria penilaian persentase sebagai berikut :

Tabel 4.4

### Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase

NO	PERSENTASE	KRITERIA PENILAIAN
1	20-35,99	Sangat kurang baik
2	36-51,99	Kurang baik
3	52-67,99	Cukup baik
4	68-83,99	Baik
5	84-100	Sangat baik

#### **4.3.1. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta**

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta merupakan salah satu variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut. Upaya untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta ini, secara detail ditentukan oleh beberapa dimensi yang diperkirakan akan mampu mengukur keberadaan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Berikut penulis deskripsikan bagaimana tanggapan responden tentang pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut yang didasarkan pada dimensi-dimensi sebagai berikut.

##### **4.3.1.1 Dimensi Komunikasi**

Untuk mengetahui kondisi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta, dalam dimensi komunikasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 6 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih

dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 6 pertanyaan tentang dimensi komunikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Kriteria Penilaian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta ( $X_1$ )  
Dimensi Komunikasi

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Informasi tentang kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dipahami oleh seluruh civitas akaedmika STIKES Garut	295	73,75	Baik
2	Informasi tentang kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dapat diperoleh dari buku panduan pengelolaan keuangan secara langsung	294	73,50	Baik
3	Kejelasan informasi tentang kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dapat pula diperoleh dari pimpinan atau bagian keuangan	281	70,25	Baik
4	Informasi tentang kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan sebaiknya diperoleh secara tepat	339	84,75	Sangat Baik
5	Informasi tentang kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan sebaiknya dipahami oleh seluruh civitas akademika STIKES Garut	324	81,00	Baik
6	Kejelasan informasi yang dipahami civitas akademika STIKES Garut sebaiknya dilaksanakan secara konsisten	329	82,25	Baik
JUMLAH			465,50	
RATA-RATA			77,58	

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta dalam dimensi komunikasi adalah **baik** yaitu sebesar 77,58% dari seluruh pertanyaan pada variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki persepsi yang positif terhadap pentingnya komunikasi dalam melaksanakan suatu kebijakan khususnya terhadap kebijakan pengelolaan keuangan.

Indikator dengan persentase tertinggi terdapat pada butir pernyataan *Informasi tentang kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan sebaiknya diperoleh secara tepat* sebesar 84,75%. Secara teoretis hal ini relevan dengan apa yang dikemukakan Ramto (2007), bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, tahap sosialisasi dan komunikasi merupakan salah satu tahapan penting untuk diperhatikan dan dilakukan secara optimal dalam rangka pencapaian sasaran kebijakan secara efektif.

Adapun persentase terendah dalam dimensi ini terdapat pada pernyataan *Kejelasan informasi tentang kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dapat pula diperoleh dari pimpinan atau bagian keuangan* sebesar 70,255%. Secara empirik kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan pimpinan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini sekaligus pula menunjukkan bahwa pada tahapan komunikasi ini masih terdapat permasalahan dan secara teoretis relevan dengan apa yang dikemukakan Ramto (2007) bahwa dimungkinkan ada tahapan dalam pelaksanaan kebijakan yang belum secara benar atau belum secara efektif dilakukan, baik dalam konteks prosedur, sosialisasi, maupun dalam implementasinya.

#### **4.3.1.2 Dimensi Sumber Daya**

Untuk mengetahui kondisi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta, dalam dimensi sumber daya maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 4 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih



dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 4 pertanyaan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta dalam dimensi sumber daya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Kriteria Penilaian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan ( $X_1$ )  
Dimensi Sumber Daya

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
7	Suatu kebijakan dapat terealisasi apabila dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang potensial	315	78,75	Baik
8	Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu teralisasi atau tidaknya suatu kebijakan secara benar di lapangan	334	83,50	Baik
9	Di samping sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga merupakan faktor penentu yang tidak dapat diabaikan dalam merealisasikan suatu kebijakan	310	77,50	Baik
10	Sarana dan prasarana yang lengkap mampu memperlancar pelaksanaan kerja dalam merealisasikan suatu kebijakan	335	83,75	Baik
JUMLAH			323,50	
RATA-RATA			80,88	

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta dalam dimensi sumber daya adalah **baik** yaitu sebesar 80,88% dari seluruh pertanyaan pada variabel tersebut. Secara empiris kondisi faktor sumber daya bukan hanya mencakup faktor sumber daya manusia/aparat semata melainkan juga mencakup

kemampuan sumber daya material lainnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjelaskan tesis bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item ke-10 yaitu *'Sarana dan prasarana yang lengkap mampu memperlancar pelaksanaan kerja dalam merealisasikan suatu kebijakan'*, sebesar 83,75 %. Keberadaan sarana dan prasarana pelaksanaan kerja merupakan satu hal penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai tampaknya akan sulit terealisasi dengan baik suatu kebijakan, termasuk kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta.

Dalam implementasi kebijakan, Edwards (1980:10-20) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat 4 (empat) faktor kritis yang mendukung, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, atau sikap, dan struktur birokrasi. Komunikasi menunjukan peranan penting sebagai acuan. agar pelaksanaan kebijakan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan, sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Sementara indikator terendah yang direspon oleh responden adalah pada pernyataan *Di samping sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga merupakan faktor penentu yang tidak dapat diabaikan dalam merealisasikan suatu kebijakan'* sebesar 77,50%. Kondisi ini secara empiris menunjukkan bahwa sarana prasarana bukanlah satu-satunya penentu dalam pelaksanaan suatu kebijakan sehingga mampu mencapai tujuan yang optimal, namun demikian sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan di STIKES karsa Husada Kabupaten Garut.

#### 4.3.1.3 Dimensi Disposisi

Untuk mengetahui kondisi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta, dalam dimensi disposisi maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 3 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 3 pertanyaan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta dalam dimensi disposisi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7  
Kriteria Penilaian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan ( $X_1$ )  
Dimensi Disposisi

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
11	Memahami suatu kebijakan, tidak hanya mengetahui saja namun mengetahui pula secara benar apa, dan bagaimana serta mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan	349	87,25	Sangat Baik
12	Dalam melaksanakan suatu kebijakan khususnya kebijakan tentang pengelolaan keuangan, diperlukan adanya pendelegasian yang jelas kepada para pegawai di lapangan	351	87,75	Sangat Baik
13	Seluruh pegawai sebaiknya mampu menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan secara benar di lapangan	345	86,25	Sangat Baik
JUMLAH			261,25	
RATA-RATA			87,08	

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta dalam dimensi disposisi atau sikap adalah **sangat baik** yaitu sebesar 87,08% dari seluruh pertanyaan pada variabel tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum responden menanggapi positif terhadap sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh para petugas dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta.

Indikator dengan persentase tertinggi yang direspon oleh responden adalah pada butir ke-12 yaitu pernyataan '*Dalam melaksanakan suatu kebijakan khususnya kebijakan tentang pengelolaan keuangan, diperlukan adanya pendelegasian yang jelas kepada para pegawai di lapangan*' sebesar 87,75%. Kondisi ini secara empiris menunjukkan bahwa disposisi harus ditunjang dengan adanya tugas pokok dan tanggung jawab serta wewenang yang diberikan pada masing-masing pegawai. Hal ini relevan dengan pernyataan yang dikemukakan Wahab (2005) bahwa prosedur kebijakan yang jelas akan menunjang pelaksanaan kebijakan secara efektif, karena *stakeholder* kebijakan memahami arah dan maksud serta tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut.

Sementara itu pernyataan yang paling kecil direspon oleh responden adalah pada pernyataan '*Seluruh pegawai sebaiknya mampu menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan secara benar di lapangan*' sebesar 86,25%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pernyataan tersebut direspon paling kecil namun tetap menunjukkan respon yang sangat baik karena memiliki persentase yang sangat baik. Secara empiris kondisi tetap menuntut adanya pelaksanaan kebijakan yang baik yang ditunjukkan oleh seluruh pegawai di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut.

#### **4.3.1.4 Dimensi Struktur Birokrasi**

Untuk mengetahui kondisi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta, dalam dimensi struktur birokrasi maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 5 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 5 pertanyaan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta dalam dimensi struktur birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8  
Kriteria Penilaian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan ( $X_1$ )  
Dimensi Struktur Birokrasi

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
14	Penanganan wajib pengelolaan keuangan sebaiknya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	329	82,25	Baik
15	Diperlukan pengawasan yang intensif dari pimpinan terhadap prosedur penanganan pengelolaan keuangan yang dilakukan pegawai	314	78,50	Baik
16	Dalam struktur pelayanan pengelolaan keuangan, sebaiknya ada pragmentasi yang jelas, sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan	334	83,50	Baik
17	Setiap pegawai harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya kepada atasan yang memberikan tugas	325	81,25	Baik
18	Setiap pegawai juga harus	327	81,75	Baik

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada masyarakat yang menjadi pelanggannya			
JUMLAH			407,25	
RATA-RATA			81,45	

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta dalam dimensi struktur birokrasi adalah **baik** yaitu sebesar 81,45% dari seluruh pertanyaan pada variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden menanggapi positif terhadap struktur birokrasi yang telah diterapkan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut.

Indikator tertinggi pada dimensi struktur birokrasi ini terdapat pada pernyataan '*Dalam struktur pelayanan pengelolaan keuangan, sebaiknya ada pragmatasi yang jelas, sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan*' sebesar 83,50%. Secara empiris kondisi ini akan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh mahasiswa sebagai sasaran dari adanya kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Horn (2005) bahwa struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Kebijakan pengelolaan keuangan dalam implementasinya jelas memerlukan arahan dan kebijakan dari pimpinan secara langsung. Apabila hal ini tidak terjadi biasanya disebabkan oleh kondisi birokrasi yang kurang berjalan dengan baik. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik

potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 7) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- 8) Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
- 9) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
- 10) Vitalitas suatu organisasi;
- 11) Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- 12) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Sementara itu indikator yang direspon paling kecil terdapat pada pernyataan *'Setiap pegawai harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya kepada atasan yang memberikan tugas'* sebesar 81,25%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pegawai serta adanya pengawasan yang intensif dari pimpinan. Hal ini relevan dengan pernyataan yang dikemukakan Iskandar (2006) yang mengemukakan bahwa pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Pengawasan yang intensif akan menekan terjadinya kesalahan dalam operasionalisasi pelaksanaan program atau kebijakan.

#### **4.3.2 Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan merupakan variabel antara dalam penelitian ini. Variabel ini dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan manajemen yang dilakukan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut dalam mengelola keuangan sehingga mahasiswa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan para pegawai. Upaya untuk mengukur bagaimana kondisi manajemen keuangan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut, dilakukan dengan mengukur beberapa dimensi yang terkait dengan manajemen keuangan yaitu (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) budgeting.

Beriku ini dideskripsikan hasil tanggapan responden terhadap manajemen keuangan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut yang didasarkan pada dimensi-dimensinya.

#### 4.3.2.1 Dimensi Perencanaan

Untuk mengetahui kondisi variabel Manajemen Keuangan dalam dimensi perencanaan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 7 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 5 pertanyaan tentang Manajemen Keuangan dalam dimensi perencanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9  
Kriteria Penilaian Manajemen Keuangan (Y)  
Dimensi Perencanaan

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
19	Perencanaan anggaran keuangan didasarkan pada identifikasi kebutuhan di lapangan	325	81,25	Baik
20	Penetapan perencanaan anggaran keuangan didasarkan pada skala prioritas kebutuhan di lapangan	351	87,75	Sangat Baik



21	Penetapan perencanaan anggaran diakhiri dengan penetapan kebutuhan	338	84,50	Sangat Baik
22	Penetapan biaya kuliah atau dana pendidikan disesuaikan antara kebutuhan dengan jumlah mahasiswa	319	79,75	Baik
23	Penetapan biaya kuliah atau dana pendidikan ditetapkan secara proporsional	323	80,75	Baik
24	Penetapan rencana kebutuhan disesuaikan antara rencana anggaran dengan realitas dana terkumpul	298	74,50	Baik
25	Realisasi rencana kebutuhan perlu direncanakan secara matang	328	82,00	Baik
JUMLAH			570,50	Baik
RATA-RATA			81,50	

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Manajemen Keuangan dalam dimensi perencanaan adalah **baik** yaitu sebesar 81,50 % dari seluruh pertanyaan pada dimensi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pegawai yang berada di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut telah memiliki kompetensi yang diharapkan, khususnya dalam hal perencanaan. Secara empiris hal ini dapat dijelaskan berdasarkan pendapat Konzt (dalam Sarwoto, 1988: 68), perencanaan adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan/mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengertian tersebut, terkandung makna bahwa pada hakekatnya aspek perencanan senantiasa terdapat dalam setiap jenis usaha manusia. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan memberdayakan semua sumber daya yang ada agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Lebih lanjut Mulyono (2010) mengemukakan bahwa perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya

tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan tersebut berarti menghimpun segala sumber daya yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. PP No 48 Tahun 2008 pasal 67 menjelaskan bahwa rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item ke-20 yaitu '*Penetapan perencanaan anggaran keuangan didasarkan pada skala prioritas kebutuhan di lapangan*' yaitu sebesar 87,75%. Secara empiris kondisi ini relevan dengan yang dikemukakan Nanang Fattah (2002: 50) persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas. Untuk itu, dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis, yaitu (Nanang Fattah, 2002: 50), yaitu (a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. (b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. (c) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab pada dasarnya anggaran merupakan pernyataan finansial. (d) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. (e) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. (f) Melakukan revisi usulan anggaran. (g) Persetujuan revisi usulan anggaran. Dan (h) Pengesahan anggaran.

Indikator yang direspon paling kecil terdapat pada pernyataan ke-24, yaitu *Penetapan rencana kebutuhan disesuaikan antara rencana anggaran dengan realitas dana terkumpul*, sebanyak 74,50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dana pendidikan itu bersifat terbatas, terlebih lagi yang diharapkan atau yang bersumber dari partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dalam penetapan rencana anggaran jelas harus didasarkan pada realitas dana yang ada.

#### **4.3.2.2 Dimensi Pengorganisasian**

Untuk mengetahui kondisi variabel Manajemen Keuangan dalam dimensi pengorganisasian, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 8 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 6 pertanyaan tentang Manajemen Keuangan dalam dimensi pengorganisasian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10  
Kriteria Penilaian Manajemen Keuangan (Y)  
Dimensi Pengorganisasian

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
26	Upaya menertibkan pengelolaan keuangan perlu ditetapkan tenaga pengelola keuangan yang memiliki kualifikasi baik	334	83,50	Baik
27	Perlu adanya pembagian tugas yang jelas antar pegawai pengelola keuangan	334	83,50	Baik
28	Menertibkan pelaksanaan pengelolaan keuangan perlu adanya struktur organisasi yang jelas	343	85,75	Sangat Baik
29	Setiap petugas dalam struktur pengelolaan keuangan perlu mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kerjanya pada pimpinan yang sudah ditetapkan	331	82,75	Baik
30	Dalam proses manajemen keuangan yang baik perlu adanya proses pengendalian yang jelas dari pimpinan	321	80,25	Baik
31	Upaya melaksanakan pengendalian keuangan perlu pula adanya staf khusus untuk mengawasi pengelolaan keuangan	314	78,50	Baik
32	Dalam proses pengorganisasian diperlukan	301	75,25	Baik

	adanya koordinasi antar staf			
33	Di samping adanya koordinasi antar staf perlu pula adanya koordinasi dengan pimpinan	273	68,25	Baik
JUMLAH			637,75	
RATA-RATA			79,72	Baik

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Manajemen Keuangan dalam dimensi pengorganisasian adalah **baik** yaitu sebesar 79,72 % dari seluruh pertanyaan pada dimensi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pegawai yang berada di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut telah memiliki pengorganisasian yang baik dalam pengelolaan keuangan. Secara empiris hal ini dapat dijelaskan berdasarkan pendapat Money (dalam Sarwoto, 1988 : 68) menegaskan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. .

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item ke-28 yaitu '*Menertibkan pelaksanaan pengelolaan keuangan perlu adanya struktur organisasi yang jelas*', sebesar 85,75 %. Kompetensi ini tampaknya merupakan kompetensi penting dalam pengelolaan keuangan. Apabila pengelolaan keuangan tidak didasarkan pada struktur organisasi yang jelas maka akan berdampak pada ketidakjelasan kepada siapa keuangan atau dana pendidikan tersebut harus diserahkan. Secara empiris hal ini dapat dijelaskan sebagaimana dikemukakan Handoko (1999 : 24), bahwa pengorganisasian (*organizing*) adalah : (1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok

kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, (3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, (4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan demikian, fungsi pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen adalah menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. Oleh karena itu, seorang manajer atau pimpinan perlu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan tipe organisasi yang sesuai dengan tujuan, rencana dan program yang telah ditetapkan. Dengan kata lain perbedaan tujuan yang ingin dicapai akan membutuhkan jenis organisasi yang berbeda pula.

Sedangkan persentase terendah terdapat pada item ke-26 yaitu '*Dalam proses pengorganisasian diperlukan adanya koordinasi antar staf*', sebesar 75,25 %. Kondisi menunjukkan bahwa koordinasi antar staf tampaknya masih perlu ditingkatkan, sehingga proses penerimaan dan perencanaan serta pengelolaan keuangan pendidikan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut dapat terlaksana dengan baik.

#### **4.3.2.3 Dimensi Budgeting**

Untuk mengetahui kondisi variabel Manajemen Keuangan dalam dimensi budgeting, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 9 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 8 pertanyaan tentang Manajemen Keuangan dalam dimensi budgeting adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11  
Kriteria Penilaian Manajemen Keuangan (Y)  
Dimensi Budgeting

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
34	Penetapan skala prioritas rencana penggunaan anggaran didasarkan pada anggaran yang ada	312	78,00	Baik
35	Berdasarkan kebutuhan yang ada ditetapkan sumber dana yang jelas	266	66,50	Cukup Baik
36	Dana yang terkumpul dialokasikan sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan	334	83,50	Baik
37	Alokasi anggaran disesuaikan juga dengan skala prioritas kebutuhan	287	71,75	Baik
38	Realisasi anggaran dilaksanakan berdasarkan rencana anggaran yang telah disepakati	268	67,00	Cukup Baik
39	Penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka	275	68,75	Baik
40	Penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel	339	84,75	Sangat Baik
41	Setiap penggunaan anggaran dilakukan evaluasi	328	82,00	Baik
42	Akhir dari kegiatan evaluasi dilakukan pelaporan		82,00	
JUMLAH			684,25	
RATA-RATA			76,03	Baik

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Manajemen Keuangan dalam dimensi budgeting adalah **baik** yaitu sebesar 76,03 % dari seluruh pertanyaan pada dimensi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum bahwa pengelolaan keuangan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan penganggaran (budgeting) telah dilakukan dengan baik. Secara teoretis hal ini relevan dengan konsep manajemen yang dikemukakan Mulyono (2010:146), yang membagi dalam tiga fase, yaitu : (a) Perencanaan finansial (*Budgeting*) yaitu kegiatan mengkoordinasi

semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan; (b) Pelaksanaan anggaran (*implementation involves accounting*), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan; dan (c) Evaluasi (*Evaluation involves*), yaitu merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item ke-40 yaitu '*Penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel*', sebesar 84,75 %. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam proses penyusunan anggaran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam PP no 48 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 59, yaitu:

a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial ekonomi.

b. Prinsip efisiensi

Prinsip ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

c. Prinsip transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat,

dan satuan pendidikan sehingga:

- 1) Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian.
- 2) Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

d. Prinsip akuntabilitas publik

Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat tiga syarat utama agar dapat tercipta akuntabilitas publik (David Wijaya: 2009), yaitu:

- 1) Adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah;
- 2) Adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
- 3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan proses yang cepat.

Sedangkan persentase terendah terdapat pada item ke-35 yaitu '*Berdasarkan kebutuhan yang ada ditetapkan sumber dana yang jelas*', sebesar 66,50 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber dana di perguruan tinggi swasta memiliki kecenderungan belum pasti, sehingga seringkali dilaksanakan secara terbalik, yaitu kebutuhan didasarkan pada anggaran yang ada.



### 4.3.3 Partisipasi Mahasiswa Membayar Dana Pendidikan

Partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan dalam penelitian ini merupakan variabel terikat yang menjadi fokus penelitian. Partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan adalah bagaimana tingkat kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam memberikan sumbangan dana pendidikan sebagaimana telah ditetapkan oleh perguruan tinggi (STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut). Upaya untuk mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan ini didasarkan pada dimensi-dimensi yang terkait erat dengan partisipasi yaitu: (1) spontan, (2) terinduksi, (3) Tertekan kebiasaan, (4) Tertekan sosial ekonomi; dan (5) tertekan peraturan.

Berikut dideskripsikan bagaimana Partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut yang didasarkan pada deskripsi masing-masing dimensi sebagai berikut.

#### 4.3.3.1 Dimensi Spontan

Untuk mengetahui kondisi variabel Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan dalam dimensi spontan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 8 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 8 pertanyaan tentang Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan dalam dimensi spontan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12

Kriteria Penilaian Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan (Y)  
Dimensi Spontan

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
43	Mahasiswa membayar dana pendidikan secara	280	70,00	Baik

	tepat waktu			
44	Mahasiswa membayar keuangan kegiatan secara tepat waktu	356	89,00	Sangat Baik
45	Ketepatan membayar dana pendidikan, memperlancar kegiatan dan proses pendidikan	351	87,75	Sangat Baik
46	Penyerahan dana pendidikan didasarkan pada unsur kepercayaan	350	87,50	Sangat Baik
47	Upaya tertib administrasi kuitansi dibuat rangkap dua	358	89,50	Sangat Baik
48	Mahasiswa menyadari bahwa membayar dana pendidikan adalah untuk kepentingannya sendiri	333	83,25	Baik
49	Mahasiswa menyadari bahwa membayar dana pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan	279	69,75	Baik
50	Mahasiswa menyadari bahwa membayar dana pendidikan merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan	351	87,75	Sangat Baik
JUMLAH			664,50	
RATA-RATA			83,06	Baik

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan dalam dimensi spontan adalah **baik** yaitu sebesar 83,06 % dari seluruh pertanyaan pada dimensi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang ada di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut telah memiliki kesadaran dalam berpartisipasi membayar dana pendidikan secara spontan yang baik.

Secara empiris kondisi ini dapat dijelaskan bahwa secara umum mahasiswa STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut memiliki kesadaran dalam membayar dana pendidikan secara spontan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memahami arti penting dana pendidikan yang akan diberikan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan yang akan diterimanya.

Dana atau biaya dalam pendidikan sebagaimana dikemukakan Fattah (2000), meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*), biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar mahasiswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji dosen, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun mahasiswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh mahasiswa selama belajar. Berdasarkan pemahaman tersebut mahasiswa secara sadar akan membayar dana pendidikan sesuai dengan besar dan waktu yang telah ditetapkan lembaga.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item ke-45 yaitu '*Ketepatan membayar dana pendidikan, memperlancar kegiatan dan proses pendidikan*', sebesar 87,75%. Secara empiris hal ini dapat dijelaskan pendidikan merupakan proses produksi yang menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga diperlukan pengelolaan pembiayaan agar mutu dari lulusan dapat bersaing di dunia kerja. Dalam meningkatkan mutu lulusan diperlukan dukungan yang kuat dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan. Dari sekian banyaknya kriteria untuk meningkatkan mutu lulusan tidak terlepas dari penggunaan uang dalam terselenggaranya proses pendidikan. Sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang.

Menurut Abubakar dan Taufani (2008:255) uang dapat dipandang ibarat darah dalam tubuh manusia yang mati hidupnya ditentukan oleh sirkulasi darah dalam tubuhnya. Uang

termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar dapat membantu pencapaian tujuan pendidikan.

Sedangkan persentase terendah terdapat pada item ke-43 yaitu '*Mahasiswa membayar dana pendidikan secara tepat waktu*', sebesar 70,00 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa seringkali membayar dana pendidikan tidak tepat waktu. Hal ini terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan ekonomi orang tua mahasiswanya.

#### 4.3.3.2 Dimensi Terinduksi

Untuk mengetahui kondisi variabel Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan dalam dimensi terinduksi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 5 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 5 pertanyaan tentang Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan dalam dimensi terinduksi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13  
Kriteria Penilaian Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan (Y)  
Dimensi Terinduksi

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
---------	---------	------------------	------------	----------

51	Mahasiswa membayar dana pendidikan setelah ada penjelasan yang detail dari pengelola pendidikan	328	82,00	Baik
52	Mahasiswa membayar dana pendidikan setelah adanya bujukan dari orang lain	309	77,25	Baik
53	Mahasiswa membayar dana pendidikan karena orang lain sudah membayar	316	79,00	Baik
54	Mahasiswa membayar dana pendidikan karena adanya tekanan dari pengelola pendidikan	358	89,50	Sangat Baik
55	Mahasiswa membayar dana pendidikan karena keuangan yang sudah ada	353	88,25	Sangat Baik
JUMLAH			416,00	
RATA-RATA			83,20	Baik

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan dalam terinduksi adalah **baik** yaitu sebesar 83,20% dari seluruh pertanyaan pada dimensi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa yang ada di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut membayar dana pendidikan setelah adanya induksi atau atau pengaruh dari luar. Bentuk induksi yang seringkali mempengaruhi kesadaran mahasiswa dalam membayar dana pendidikan dapat timbul dari kondisi ekonomi, maupun adanya tekanan dari pihak lembaga.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item ke-54 yaitu '*Mahasiswa membayar dana pendidikan karena adanya tekanan dari pengelola pendidikan*', sebesar 89,50%. Secara empiris hal ini dapat dijelaskan bahwa pada hakekatnya masih ada mahasiswa STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut yang baru membayar dana pendidikan setelah adanya peringatan dari pihak lembaga. Bentuk peringatan yang dilakukan Perguruan Tinggi Swasta termasuk STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut

dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bentuk tekanan dari lembaga dilakukan dengan memberikan surat tagihan, sementara secara tidak langsung pihak STIKES menerapkan syarat mengikuti ujian bagi mahasiswa adalah apabila telah melunasi seluruh keuangan yang harus dibayar oleh mahasiswa.

Sedangkan persentase terendah terdapat pada item ke-52 yaitu '*Mahasiswa membayar dana pendidikan setelah adanya bujukan dari orang lain*', sebesar 77,25%. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses induksi dengan melakukan bujukan tampaknya kurang relevan dengan kondisi mahasiswa yang telah memiliki pola pikir yang rasional. Mahasiswa akan tumbuh partisipasi alam membayar dana pendidikan dengan adanya tekanan maupun peringatan dari lembaga.

#### **4.3.3.3 Dimensi Tertekan Kebiasaan**

Untuk mengetahui kondisi variabel Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan dalam dimensi tertekan kebiasaan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 4 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 4 pertanyaan tentang Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan dalam dimensi tertekan kebiasaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14

Kriteria Penilaian Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan (Y)

Dimensi Tertekan Kebiasaan

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
56	Mahasiswa biasa membayar dana pendidikan pada waktu dan tanggal tertentu	322	80,50	Baik
57	Mahasiswa biasa membayar dana pendidikan pada petugas yang sama	336	84,00	Sangat Baik
58	Mahasiswa biasa membayar dana pendidikan secara tertib	355	88,75	Sangat Baik
59	Mahasiswa membayar dana pendidikan karena merasa malu pada mahasiswa yang lain	339	84,75	Sangat Baik
JUMLAH			338,00	
RATA-RATA			84,50	Sangat Baik

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan dalam dimensi tertekan kebiasaan adalah **sangat baik** yaitu sebesar 84,50% dari seluruh pertanyaan pada dimensi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang ada di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut memiliki kultur atau budaya yang menekan tingkat partisipasi mahasiswa dengan kebiasaan yang dilakukannya. Secara empiris suatu kebiasaan seringkali menjadi tekanan apabila suatu waktu melakukan suatu kegiatan yang di luar kebiasaan. Mahasiswa yang memiliki karakter atau budaya seperti ini menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut memiliki kekuatan untuk mempertahankan kebiasaan yang baik.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item ke-58 yaitu '*Mahasiswa biasa membayar dana pendidikan secara tertib*', sebesar 88,75%. Secara empiris hal ini dapat dijelaskan bahwa mahasiswa STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut memiliki satu kebiasaan yang baik yaitu dengan cara membayar dana pendidikan secara tertib. Tertib dalam membayar

dana pendidikan dapat diamati dari ketepatan waktu membayar dengan jumlah yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Ketertiban dalam waktu dan jumlah pembayaran dana pendidikan yang sesuai menunjukkan adanya keinginan mahasiswa berpartisipasi dalam kelancaran pelaksanaan pendidikan di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut.

Sedangkan persentase terendah terdapat pada item ke-56 yaitu '*Mahasiswa biasa membayar dana pendidikan pada waktu dan tanggal tertentu*', sebesar 80,50%. Kondisi ini meskipun direspon paling kecil, namun apabila dilihat dari persentasenya menunjukkan respon yang baik. Artinya tanggapan responden masih relevan dengan pernyataan sebelumnya, yaitu mahasiswa memiliki kebiasaan membayar dana pendidikan secara tertib.

#### **4.3.3.4 Dimensi Tertekan Sosial Ekonomi**

Untuk mengetahui kondisi variabel Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan dalam dimensi tertekan sosial ekonomi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 4 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 5 pertanyaan tentang Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan dalam dimensi tertekan sosial ekonomi adalah sebagai berikut :



Kriteria Penilaian Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan (Y)

Dimensi Tertekan Sosial Ekonomi

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
60	Mahasiswa membayar dana pendidikan karena khawatir ada sanksi administratif	331	82,75	Baik
61	Mahasiswa membayar dana pendidikan karena khawatir tidak bisa mengikuti perkuliahan	292	73,00	Baik
62	Mahasiswa membayar dana pendidikan karena khawatir diskor dari pendidikan	355	88,75	Sangat Baik
63	Mahasiswa membayar dana pendidikan karena khawatir dikeluarkan	349	87,25	Sangat Baik
JUMLAH			331,75	
RATA-RATA			82,94	Baik

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan dalam dimensi tertekan sosial ekonomi adalah **baik** yaitu sebesar 82,94% dari seluruh pertanyaan pada variabel tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang ada di STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut dalam membayar dana pendidikannya juga mendapat tekanan dari kondisi sosial ekonominya.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item ke-62 yaitu '*Mahasiswa membayar dana pendidikan karena khawatir diskor dari pendidikan*', sebesar 82,94%. Secara empiris hal ini dapat dijelaskan bahwa pada hakekatnya mahasiswa memiliki satu ketakutan dalam menjalankan perkuliahannya, yaitu kekhawatiran diskor atau bahkan dikeluarkan dari perkuliahan. Terlebih lagi apabila penskoran atau dikeluarkannya diakibatkan karena masalah uang kuliah atau dana pendidikan.

Oleh karena itu baik mahasiswa maupun orang tua akan berupaya seoptimal mungkin untuk menyiapkan dana pendidikan.

Sedangkan persentase terendah terdapat pada item ke-61 yaitu '*Mahasiswa membayar dana pendidikan karena khawatir tidak bisa mengikuti perkuliahan*', sebesar 73,00%. Kondisi ini tampaknya tidak terlalu dikhawatirkan oleh mahasiswa, hal ini disebabkan untuk perkuliahan seringkali tidak disangkutpautkan dengan pembayaran dana pendidikan. Pembayaran dana pendidikan hanya seringkali dikaitkan dengan pelaksanaan ujian.

#### **4.4. Pengujian Hipotesis Penelitian dan Pembahasan**

Rumusan hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ho = *Terdapat pengaruh pelaksanaan Kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap manajemen keuangan dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan*

Ha = *Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan Kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap manajemen keuangan dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan*

Berdasarkan hipotesis utama tersebut, penulis jabarkan dalam sub-sub hipotesis sebagai berikut:

1. Ho = *Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap manajemen keuangan*

Ha = *Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap manajemen keuangan*

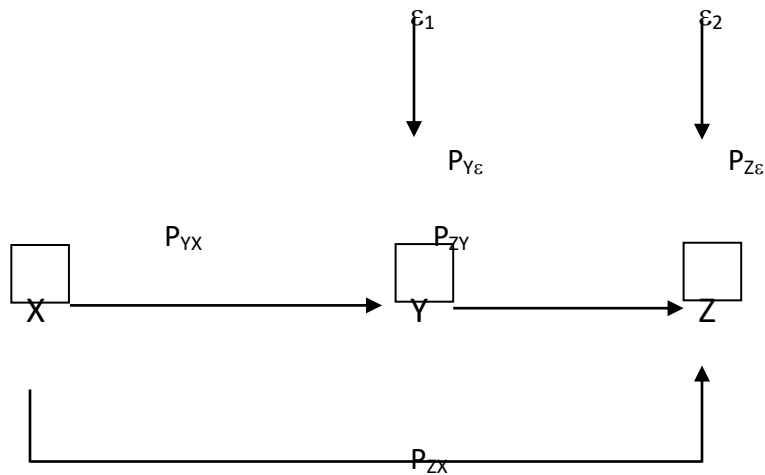
2. Ho = *Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan*

Ha = *Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan*

3. Ho = *Terdapat pengaruh manajemen keuangan terhadap partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan*

Ha = *Tidak terdapat pengaruh manajemen keuangan terhadap partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan*

Untuk menjawab hipotesis tersebut dilakukan uji melalui analisis jalur (path analysis) yang disusun dalam diagram jalur berikut ini :



Dari diagram jalur tersebut, maka persamaan strukturalnya dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = P_{yx} + P_{y\varepsilon}$$

$$Z = P_{zx} + P_{zy} + P_{z\varepsilon}$$

$$Z = P_{zy} + P_{z\varepsilon}$$

Untuk menguji kebermaknaan dari paradigma atau jalur diatas, maka dilakukan pengujian terhadap koefisien jalur melalui tahapan :

- (1) Pengujian secara simultan, yaitu untuk menguji pengaruh dari variabel bebas dan variable antara terhadap variabel tidak bebas.
- (2) Pengujian secara parsial, yaitu dimaksudkan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara masing-masing.

#### **4.4.1 Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) Terhadap Manajemen Keuangan (Y) dalam Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa Membayar Dana Pendidikan (Z)**

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : *“Terdapat Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) Terhadap Manajemen Keuangan (Y) dalam Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa Membayar Dana Pendidikan (Z)”*. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan

pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,846.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel X terhadap Y dalam meningkatkan Z, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$ . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  ( $F_{0,975;78}$ ) yaitu  $F_{hitung} = 97,292 > F_{tabel} = 2,69$ . Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  diterima, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) dan Manajemen Keuangan (Y) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan (Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* ( $R^2_{YZX}$ ) sebesar = 0,716. Nilai ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) dan Manajemen Keuangan (Y) berpengaruh terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan (Z) sebesar 71,6 %, sedangkan sisanya  $(P_{YZ\epsilon})^2$  sebesar 28,4 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) dan Manajemen Keuangan (Y) yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik di atas tampak adanya pengaruh yang signifikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta dan manajemen keuangan terhadap partisipasi mahasiswa membayar dana pendidikan. Hal ini tampaknya merupakan dampak langsung yang dirasakan oleh para mahasiswa maupun pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta. Keberadaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan

Tinggi Swasta memberi satu kontribusi terhadap manajemen keuangan sehingga mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan. Hal ini disebabkan esensi dari Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta itu sendiri, dimaksudkan untuk memberikan kejelasan kepada mahasiswa maupun pengelola keuangan terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik di atas tampak adanya pengaruh yang signifikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan terhadap manajemen keuangan sehingga mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan. Hal ini tampaknya merupakan dampak langsung yang dirasakan oleh mahasiswa dalam pelaksanaan pendidikan (perkuliahan) serta terpenuhinya hak-hak mahasiswa di STIKes Kabupaten Garut. Kondisi seperti itu diasumsikan oleh mahasiswa bahwa dana pendidikan yang diberikan mampu dikelola dengan baik yang didasarkan pada manajemen keuangan yang teratur.

Hasil pengujian di atas, secara teoretis relevan dengan pendapat yang terkait dengan kebijakan, kebijakan tentang pengelolaan keuangan muncul dengan tujuan untuk memberikan kejelasan dalam mengatur dan mengelola keuangan di perguruan tinggi swasta. Hal ini relevan dengan apa yang dikemukakan Iskandar (2004) yang mengemukakan bahwa suatu kebijakan memuat implikasi-implikasi, yaitu : (1) Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan; (2) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah; (4) Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan (5) Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa.

Kebijakan publik, paling tidak dalam bentuknya yang positif, pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (*Community as a whole*) dan

memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta (Solichin, 2002: 17). Sementara itu Jones (2001 : 46) kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan dengan tujuan (*goal*), program (*program*), keputusan (*decision*), hukum (*law*), proposal (*proposal*) dan maksud besar tertentu (*the large certain goal*). Lebih lanjut mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut tampak jelas bahwa kebijakan itu muncul dengan tujuan positif dalam mencapai sesuatu hal secara optimal dan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan tentang pengelolaan keuangan di PTS merupakan satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam memberikan acuan dan panduan dalam mengelola keuangan di perguruan tinggi yang harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam hal ini pada mahasiswa dalam bentuk pelayanan pendidikan yang optimal.

Adanya faktor epsilon sebesar 29,95% menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar kebijakan tentang pengelolaan keuangan. Partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan akan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonominya. Kesadaran dan keinginan untuk berpartisipasi dalam membayar dana pendidikan akan ditentukan pula oleh kesiapan orang tua dalam menyediakan uang untuk pembayaran dana pendidikan tersebut.

#### 4.4.2 Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) Terhadap Manajemen Keuangan (Y)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : *“Terdapat Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) Terhadap Manajemen Keuangan (Y)”*. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,846.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel X terhadap Y, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $t_{0,975 ; 78}$ ) yaitu  $t_{hitung} = 14,016 > t_{tabel} = 1,9822$ . Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  diterima, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) berpengaruh terhadap variabel Manajemen Keuangan (Y).

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* ( $R^2_{ZY}$ ) sebesar = 0,716. Nilai ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) berpengaruh terhadap Manajemen Keuangan (Y) sebesar 71,6 %, sedangkan sisanya ( $P_{Y\epsilon}$ )<sup>2</sup> sebesar 28,4 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Dari hasil pengujian diketahui bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta memberikan pengaruh nyata terhadap Manajemen Keuangan. Pengaruh Pelaksanaan



Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta terhadap Manajemen Keuangan adalah sebesar 71,6 %, sedangkan pengaruh diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta adalah sebesar 28,4 %.

Kondisi tersebut secara teoretis relevan dengan tujuan manajemen keuangan (*The Main Objective of Financial Management*) yaitu memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, bukan memaksimalkan profit. Arti memaksimalkan profit, berarti mengabaikan tanggung jawab social, mengabaikan risiko, dan berorientasi jangka pendek. Sedangkan arti memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan sebagai berikut: (a) Berarti memaksimalkan nilai sekarang (present value) semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Dan (b) Berarti lebih menekankan pada aliran hasil bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi. Manajemen pengelolaan keuangan di perguruan tinggi swasta beryujuan untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan oleh lembaga perguruan tinggi pada mahasiswa sehingga mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang dihasilkannya.

Upaya pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, jelas memerlukan aturan dan pengelolaan yang baku yang dapat diterima oleh berbagai pihak dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola keuangan. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang mengtur pola dan arah pengelolaan keuanga.

Secara teoritis, kebijakan publik (termasuk kebijakan tentang pengelolaan keuangan) selalu mengandung tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana didefinisikan Edwards dalam Islami (1999:20) sebagai . . . . *what the government say to do or not to do. It is the goal or purpose of government programs*". Van Mater dan Van Horn dalam Wahab (1997:65) mengemukakan bahwa implementasi

kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan (*successful implementation*) atau tidak tercapainya tujuan kebijakan yang biasa disebut sebagai *implementation gap*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan akan mempengaruhi derajat pencapaian tujuan kebijakan.

Kebijakan tentang pengelolaan keuangan sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang memberikan kejelasan kepada pengelola keuangan dalam mengatur dan menetapkan sumber dana serta memanfaatkan dana yang ada sesuai peruntukannya. Hal ini dimaksudkan agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu memberikan pelayanan kepada mahasiswa dalam melaksanakan proses perkuliahan.

Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien (Depdiknas, 2007:6). Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan uang. Untuk itu, kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan perlu dilakukan dengan baik. Mulyono (2010:) mengemukakan bahwa keberhasilan pendidikan dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas juga tidak terlepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber pendapatan pendidikan saja, namun lebih kepada penggunaan dana secara efektif dan efisien. Semakin efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dengan pencapaian efisiensi dana pendidikan, maka tercapai pula efektifitas kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah, (Mulyono, 2010:157) adalah: (a) Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali; (b) Memelihara barang-barang (aset) sekolah; (c) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

Sementara itu adanya epsilon atau pengaruh lain selain kebijakan tentang pengelolaan keuangan terhadap manajemen keuangan, karena manajemen keuangan merupakan satu kondisi yang dapat tumbuh dengan adanya pengaruh yang cukup banyak, khususnya yang terkait dengan kinerja pegawai dan kemampuan pegawai dalam menyusun manajemen keuangan. Di samping itu dalam proses penyusunan manajemen keuangan jelas memerlukan adanya kerjasama dan komunikasi serta arahan yang jelas dari seorang manajer.

Di dalam perusahaan yang besar bidang keuangan dipimpin oleh seorang manajer keuangan (*chief financial manager*). Manajer keuangan atau sering disebut direksi keuangan melaporkan secara langsung kepada direktur keuangan atau presiden direktur. Sedangkan di dalam departemen keuangan dalam suatu perusahaan dibagi lagi ke dalam beberapa bagian/divisi yang dipunyai oleh seorang kepala divisi meliputi:

- a. Divisi anggaran, bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan memperbaiki budget operasi (*operating budget*)
- b. Divisi penganggaran modal (*capital budgeting*) yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan analisis pengeluaran modal
- c. Divisi perencanaan keuangan, yang bertanggung jawab untuk mengambil alternatif pemenuhan kebutuhan dana jangka panjang

- d. Divisi perencanaan keuangan jangka pendek, yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dana jangka pendek, serta investasi jangka pendek pada surat berharga (*marketable securities*)
- e. Divisi kredit, bertanggung jawab untuk menentukan kredit yang akan diberikan kepada langganan, disamping itu divisi ini juga bertanggung jawab dalam negoisasi dengan kreditor (lembaga keuangan Bank dan bukan Bank)
- f. Divisi hubungan masyarakat (*human relation*), bertanggung jawab terhadap pembentukan image/komunikasi antara perusahaan, pemegang saham, para investor dan masyarakat keuangan secara umum.

Semua komponen atau divisi-divisi tersebut idealnya mampu bekerjasama dengan baik sehingga akan dicapai satu bentuk manajemen pengelolaan keuangan yang baik

#### **4.4.3 Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) Terhadap Partisipasi Mahasiswa Membayar Dana Pendidikan (Z)**

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : “*Terdapat Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) Terhadap Partisipasi Mahasiswa Membayar Dana Pendidikan (Z)*”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,788.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel X terhadap Z, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  Berdasarkan pengujian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $t_{0,975 ; 78}$ ) yaitu  $t_{hitung} = 11,320 > t_{tabel} = 1,9822$ .

Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  diterima, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) berpengaruh terhadap variabel Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan (Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* ( $R^2_{ZY}$ ) sebesar = 0,622. Nilai ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (X) berpengaruh terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan (Z) sebesar 62,2 %, sedangkan sisanya ( $P_{Y\epsilon}$ )<sup>2</sup> sebesar 37,80 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Dari hasil pengujian diketahui bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta berpengaruh nyata terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan sebesar 62,2 %, sedangkan pengaruh diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta adalah sebesar 37,8 %.

Hasil penelitian dan analisis statistik tersebut, secara teoretis relevan dengan apa yang dikemukakan Verhagen dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi

akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan. Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep man-centered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

Partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan adalah suatu dorongan untuk turut serta dalam mensukseskan pelaksanaan pendidikan. Kondisi ini disamping sudah merupakan satu tata aturan yang sudah berlaku juga didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut PP No 48 tahun 2008 pasal 51 ayat 4 tentang dana pendidikan satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh pemerintah dapat bersumber dari: (1) Anggaran Pemerintah; (2) Bantuan Pemerintah Daerah; (3) Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; (4) Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua /walinya; (5) Bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan (6) Sumber lainnya yang sah.

Kontribusi partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan diharapkan mampu dikelola dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan dana pendidikan yang masuk, maka seyogyanya dilakukan proses penglokasian penggunaan dana yang jelas. Pengalokasian adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan disekolah (Depdiknas, 2009). Alokasi keuangan Sekolah Negeri dan Swasta terdiri dari: (1) Alokasi pembangunan fisik dan non fisik; (2) Alokasi kegiatan rutin, seperti belanja pegawai, kegiatan belajar mengajar, pembinaan kesiswaan, dan kebutuhan rumah tangga.

Adanya factor epsilon yang mempengaruhi partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan, sudah jelas bahwa tingginya partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan juga akan ditentukan oleh kondisi kesadaran dari mahasiswa dan orang tua. Disamping adanya kesadaran, partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan juga akan ditentukan oleh kesiapan orang tua dalam mengalokasikan dana pendidikan bagi anak-anaknya.

#### **4.4.4 Pengaruh Manajemen Keuangan (Y) Terhadap Partisipasi Mahasiswa Membayar Dana Pendidikan (Z)**

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : “*Terdapat Pengaruh Manajemen Keuangan (Y) Terhadap Partisipasi Mahasiswa Membayar Dana Pendidikan (Z)*”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,831.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Y terhadap Z, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $t_{0,975; 78}$ ) yaitu  $t_{hitung} = 13,206 > t_{tabel} = 1,9822$ . Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  diterima, sehingga variabel Manajemen Keuangan (Y) berpengaruh terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan (Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* ( $R^2_{ZY}$ ) sebesar = 0,691. Nilai ini menunjukkan bahwa Manajemen Keuangan (Y) berpengaruh terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan (Z) sebesar 69,1%, sedangkan sisanya ( $P_{Y\epsilon}$ )<sup>2</sup> sebesar 30,9 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Manajemen Keuangan yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Dari hasil pengujian diketahui bahwa Manajemen Keuangan memberikan pengaruh terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan. Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan adalah sebesar 69,1 %, sedangkan pengaruh diluar variabel Manajemen Keuangan adalah sebesar 30,9 %.

Hasil perhitungan statistik tersebut dapat dijelaskan bahwa Biaya pendidikan memegang peran yang penting di dalam keberlangsungan hidup dunia pendidikan (David Wijaya, 2009: 91). Pentingnya



biaya dalam suatu penganggaran yaitu biaya memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Mulyono mendefinisikan biaya sebagai jumlah uang yang disediakan atau dialokasikan dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen.

Nanang Fattah (2000: 23) mengatakan bahwa anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah, baik rutin maupun insidental, yang diterima dari berbagai sumber resmi.

Dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan (PP no 48 Tahun 2008 pasal 59) antara lain:

a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial ekonomi.

b. Prinsip efisiensi

Prinsip ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

c. Prinsip transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik

oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga: (1) Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian. (2) Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

e. Prinsip akuntabilitas publik

Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat tiga syarat utama agar dapat tercipta akuntabilitas publik (David Wijaya: 2009), yaitu: (a) Adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah; (b) Adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang; (c) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan proses yang cepat.

Terkait dengan manajemen keuangan di sekolah, E. Mulyasa (2006: 48) mengemukakan bahwa: "Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Dalam rangka implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran."

Sejalan dengan pendapat Mulyasa, Bafadal (2004) juga mengungkapkan bahwa fungsi dari manajemen keuangan sekolah meliputi kegiatan-kegiatan (1) perencanaan anggaran tahunan, yaitu penyusunan secara komprehensif dan realistis mengenai rencana pendapatan dan pembelanjaan satu tahun sekolah; (2) pengadaan anggaran, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mendapat masukan dana dari sumber-sumber keuangan sekolah; (3) pendistribusian anggaran, yaitu penyaluran anggaran sekolah kepada unit-unit tertentu di sekolah; (4) pelaksanaan anggaran, di mana setiap personel sekolah menggunakan seluruh anggaran yang terdistribusikan kepada dirinya untuk melaksanakan tugasnya; (5) pembukuan keuangan, yaitu keseluruhan pencatatan secara teratur mengenai perubahan-perubahan yang terjadi atas penghasilan dan kekayaan sekolah; dan (6) pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, yaitu kegiatan pemeriksaan seluruh pelaksanaan anggaran sekolah.

Berdasarkan konsep manajemen keuangan tersebut, diharapkan mampu memberikan motivasi dan keyakinan bagi mahasiswa akan arti penting partisipasinya dalam membayar dana pendidikan. Motivasi mahasiswa untuk berpartisipasi itulah yang diharapkan akan mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai pengaruh pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta terhadap Manajemen Keuangan dalam upaya meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan di STIKes Kabupaten Garut, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi objektif variabel penelitian hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:
  - a. Variabel implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta menunjukkan kriteria baik, hal ini ditunjukkan dengan pencapaian persentase rata-rata jawaban responden terhadap variabel tersebut. Proporsi tertinggi yang menunjukkan tanggapan terbaik responden adalah 'Dalam melaksanakan suatu kebijakan khususnya kebijakan tentang pengelolaan keuangan, diperlukan adanya pendelegasian yang jelas kepada para pegawai di lapangan'.
  - b. Variabel Manajemen Keuangan menunjukkan kriteria baik, hal ini ditunjukkan dengan pencapaian persentase rata-rata tanggapan responden terhadap Manajemen Keuangan. Proporsi tertinggi tanggapan responden berkaitan dengan 'Penetapan perencanaan anggaran keuangan didasarkan pada skala prioritas kebutuhan di lapangan'.
  - c. Variabel Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan menunjukkan kriteria baik, hal ini juga ditunjukkan dengan pencapaian persentase rata-rata jawaban responden terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan. Proporsi tertinggi yang direspon positif oleh responden adalah berhubungan dengan 'Ketepatan membayar dana pendidikan, memperlancar kegiatan dan proses pendidikan'.

2. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen keuangan di STIKes Karsa Husada Kabupaten Garut. Kondisi ini diperkuat dengan hasil perhitungan yang menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .
3. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan di STIKes Karsa Husada Kabupaten Garut. Kondisi ini diperkuat dengan hasil perhitungan yang menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .
4. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa manajemen keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan di STIKes Karsa Husada Kabupaten Garut. Kondisi ini diperkuat dengan hasil perhitungan yang menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .
5. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta mempunyai pengaruh terhadap Manajemen Keuangan dalam upaya meningkatkan Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan baik secara simultan maupun secara parsial..
6. Temuan penelitian:
  - a. Temuan permasalahan penting yang berkaitan dengan variabel pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan adalah dimensi komunikasi yaitu berkaitan kejelasan informasi tentang kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dapat pula diperoleh dari pimpinan atau bagian keuangan. Pada dimensi sumber daya yaitu terkait dengan sarana dan prasarana kerja yang belum optimal, namun demikian sarana dan prasarana

bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam pelaksanaan suatu kebijakan sehingga mampu mencapai tujuan.

- b. Temuan permasalahan pada variabel Manajemen Keuangan pada dimensi perencanaan terjadi pada pernyataan penetapan rencana kebutuhan disesuaikan antara rencana anggaran dengan realitas dana terkumpul. Dimensi pengorganisasian terjadi pada pernyataan dalam proses pengorganisasian diperlukan adanya koordinasi antar staf.
- c. Temuan permasalahan pada variabel Partisipasi Mahasiswa dalam Membayar Dana Pendidikan, dimensi spontan yaitu masih rendahnya mahasiswa dalam membayar dana pendidikan secara tepat waktu; dimensi terinduksi yaitu mahasiswa membayar dana pendidikan setelah adanya bujukan dari orang lain; dimensi tertekan kebiasaan yaitu mahasiswa membayar dana pendidikan karena merasa malu pada mahasiswa.

## **5.2 Saran**

Dana pendidikan merupakan instrumen untuk memperoleh pendapatan (*budgeter*) dan kemudian didistribusikan untuk kepentingan mahasiswa dalam proses pendidikannya. Keberadaan dana pendidikan menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan mahasiswa terlibat dalam membiayai kebutuhan-pelayanan pendidikannya. Dana pendidikan merupakan sumber dana utama yang akan digunakan oleh lembaga pendidikan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yang merupakan tugas utama lembaganya.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta merupakan satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya memberikan arah dan kepastian dalam mengelola keuangan untuk kepentingan mahasiswanya. Kepuasan mahasiswa, merupakan hal penting yang sekaligus memiliki pengaruh terhadap peningkatan partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan. Secara umum Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta berisi

proses dan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta serta besarnya dana pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disampaikan beberapa saran berikut:

1. Untuk perubahan dan perbaikan kebijakan

- a. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta harus dilakukan lebih komprehensif dalam rangka mendorong dan membangkitkan partisipasi aktif dari seluruh komponen yang terlibat dengan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta, baik dari pimpinan, pegawai maupun mahasiswa. Secara operasional dapat dilakukan dengan menyebarkan buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis proses pengelolaan keuangan serta penyusunan anggaran yang transparan dan akuntabel.
- b. Perlu ada pengawasan secara kontinyu dan teratur serta ditindak lanjuti dengan adanya evaluasi hasil pelaksanaan dalam proses pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya proses pengawasan dan pemeriksaan baik secara administratif maupun secara praktik di lapangan pada proses pengelolaan keuangan.

2. Pemecahan masalah teknis

- a. Terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta, terutama apabila terjadi hal-hal yang bersifat insidental, perlu adanya kebijakan tambahan dari pimpinan yang terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta, terutama apabila ditemukan kendala dan permasalahan dalam proses pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta. Di samping itu kebijakan yang dibuat pemerintah seringkali diperlukan penyesuaian seperlunya di lapangan, sehingga kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan baik.



- b. Terkait dengan Manajemen Keuangan, perlu ditingkatkan adanya kerjasama antar personal, sehingga mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik dan tepat. Di samping itu perlu pula di buat tim khusus apabila menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta.
- c. Dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam membayar dana pendidikan, sebaiknya terlebih dahulu ditingkatkan pelayanan pendidikan kepada mahasiswa. Pelayanan yang optimal pada mahasiswa diharapkan akan mampu menyadarkan mahasiswa bahwa dana pendidikan yang diberikannya adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Di samping itu untuk membantu mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, perlu pula dibantu melalui pengajuan bantuan beasiswa dari pemerintah maupun dari KOPERTIS.

### 3. Penelitian lebih lanjut

Mengingat terdapat beberapa temuan penelitian yang perlu diperhatikan dan karena keterbatasan dalam penelitian ini, maka pada masa mendatang berbagai pihak dapat melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan Manajemen Keuangan, kebijakan lain di luar variabel yang telah dikaji dan diteliti dalam penelitian ini, diantaranya masalah motivasi kerja, iklim organisasi, dan mutu layanan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Anoraga, Panji. 2004. *Manajemen Bisnis*. Cet-3. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anderson, J.E. 1979. *Public Policy Making*. New York : Holt, Rinehart and Winston
- Anwar, M.I. 1991. *Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan*. Mimbar Pendidikan, No.1 Tahun x, 1991: 28-33.
- Barzeley, Michael. 1992. *Breaking Through Bureaucracy*. New Vision for Managing in Government. University of California Press. Barkeley. USA
- Budi Rahardjo. (2001). *Akuntansi dan Keuangan Untuk Manajer Nonkeuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Davis, Keith & John W.N. 2004. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta. Erlangga.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kevijakan Publik*. Alih Bahasa Samodra Wibawa, Diah Asitadami, Agus Heruanto Hadna dan Erwan Agus Purwanto. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Easton, D. 1965. *A. System Analysis Political Life*. New York : Welley.
- Edi Suharto. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edward, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. Conressional Quartely Press.
- Emery, et.al. (2004) *Corporate Financal Management*, 2nd edition, New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Fattah, Nanang. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja RosdaKarya.
- Fattah, N. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Gasperz, Vincent. 1997. *Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE.
- Hasibuan, S.P. 1997. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta. CV. Haji Mas Agung.
- Iskandar, Jusman.,2004. *Manajemen Publikl*. Puspaga : Bandung.

-----, 2005a, *Metoda Penelitian Administrasi*, Puspaga: Bandung.

-----, 2005b. *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Puspaga: Bandung.

-----, 2009c. *Metodologi Penelitian Administrasi* . Puspaga: Bandung.

-----, 2009d. *Teori Administrasi*. Puspaga: Bandung.

Islamy, Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan VII. Bumi Aksara: Jakarta.

John, Echols dan Shadily H. 2007. *Kamus Inggris – Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia

Jones Charles, O. 2001. *An Introduction to The Study Public Policy*. Alih bahasa oleh Ricky Istanto. Raja G. Persada: Jakarta.

Karnaen. 2003. *Bahan-bahan Perkuliahan Statistik*. Program Pascasarjana Universitas Garut.

Kasim, Azhar. 2005. *Tantangan Terhadap Pembangunan Administrasi Publik*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Nomor 2/Vol.1/MAret 1996*

Mangkunegara. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung. Rosda.

Mc. Load, William. 1989. *The Neww Collins Dictionary and Thesaurus*. Glasgow: William Collins Sons & Co Ltd.

Nasution, S. 2003. *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara.

Nawawi, Hadari, 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada – Press.

Nazir, Mohammad. 2002. *Metode Penelitian*. Ghalia. Jakarta.

Parasuraman, J. Andi. 2001. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Hanindia Graha.

Poerwadarminta, 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Depdikbud. Jakarta.

- Siagian. 2002. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Masagung.
- , 2001a. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Silalahi, Oberlin. 2002. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*. Edisi I. Yogyakarta; Liberty.
- Singadilaga, Dudi. 2003. *Ruang Lingkup dan Teori Kebijakan Publik*. Diklat Kuliah. Program Pasca Sarjana Universitas Garut.
- Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Cetakan I. Jakarta; Bumi Aksara
- Solichin Abdul., 2004. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Sudarsono, Hardjosoekarto. 2004. *Debirokrasi; Relevansi dan Masalahnya*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* Nomor 2/Volume I/Maret
- Sugiyono. 2004. *Teknik Analisis Korelasi dan Regresi Bagi Para Peneliti*, Bandung : Tarsito
- Suradinata, Ermaya. 2005. *Administrasi Lingkungan dan Ekologi Pemerintahan dalam Pembangunan*. Bandung: Ramadhan.
- Tampubolon, Daulat.P. 2001. *Perguruan Tinggi Bermutu (Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Ke-21)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tjokroamidjojo, Bintaro. 2001. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta; CV Haji Mas Agung.
- Usman, Uzer. 2000. *Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab. 2005. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widjaja. 2002. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Winardi. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenada Media.

## **B. Dokumen-Dokumen:**

Kep./25/M.PAN/2/2004 tentang *Sistem Pelayanan Aparatur Negara (PS PAN)*

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 yang telah disempurnakan melalui Keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004, khususnya Bab VIII pasal 57 tentang Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran.

Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-332/M/V/9/1968 tanggal 28 September 1968 yang merupakan salah satu dasar bagi pengelola keuangan negara

PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.